

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Secara geografis Kota Solok berada pada posisi 0°44'28"LS sampai 0°49'12"LS dan 100°32'42"BT sampai 100°41'12"BT, dengan luas wilayah 57,64 km² atau lebih kurang 0,14% dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Kota Solok merupakan salah satu dari tujuh kota di Propinsi Sumatera Barat, dan berada pada simpul jalan lintas sumatera, dengan jarak terhadap kota-kota utama di Sumatera Barat, yaitu + 64 km dari kota Padang dan + 73 km dari Kota Bukittinggi. Selain itu, wilayah Kota Solok yang terdiri atas dua kecamatan, Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, dikelilingi dan berbatasan langsung dengan beberapa kenagarian di Kabupaten Solok dan Kota Padang.

Posisi geografis yang demikian mempengaruhi bentangan alam Kota Solok, dengan topografi yang bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian antara 100 – 1.525 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan keadaan kelerengan wilayah, sebagaimana terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 . Pembagian Wilayah Berdasarkan Kemiringan

No.	Klasifikasi Lereng	Kelerengan (%)	Lubuk Sikarah		Tanjung Harapan		Jumlah	
			(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Datar	0 – 2	561,36	16,04	223,15	9,86	784,51	13,61
2	Landai	2 – 8	890,86	25,45	984,52	43,49	1.875,38	32,54
3	Berbukit	8 – 15	440,16	12,58	621,97	27,47	1.062,13	18,43
4	Curam	15 – 25	730,77	20,88	249,73	11,03	980,50	17,01
5	Sangat Curam	25 – 40	776,79	22,19	178,23	7,87	955,01	16,57
6	Sangat Curam, Terjal	> 40	100,28	2,87	6,18	0,27	106,46	1,85
			3.500	100,00	2.264	100,00	5.764	100,00

Sumber : Dokumen RTRW Kota Solok 2012

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Kota Solok dengan luas 5.764 Ha, memiliki daerah datar dengan kelerengan 0 – 2 % atau seluas 784,51 Ha, tersebar di pusat kota, daerah landai 2 – 8 % atau seluas 1.875,38 Ha yang tersebar di bagian selatan dan utara kota, daerah berbukit dengan kelerengan 8 -15 % atau seluas 1.062, 13 Ha tersebar di bagian timur laut dan bagian barat kota. Sementara itu, wilayah kota dengan kelerengan 15 – 25 % atau seluas 980,50 Ha juga tersebar di bagian timur laut dan bagian barat kota, dan wilayah agak curam dengan kelerengan 25 - 40 %

atau 955,01 Ha tersebar di bagian utara dan beberapa di arah barat kota, dan daerah sangat curam, terjal dengan kelerengan diatas 40 % atau seluas 106,46 Ha tersebar di arah barat kota.

Kota Solok dengan luas 5.764 Ha dan dengan luas kemiringan yang tergambar di atas telah dimanfaatkan dengan uraian seperti tabel berikut :

Tabel 2.2. Luas Tanah Menurut Penggunaannya per Kecamatan di Kota Solok

Penggunaan Tanah		Luas Tanah Kecamatan (Ha)		Jumlah (Ha)	Persentase (%)
		Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan		
01.	Perumahan/	514.21	309.01	823.22	14.28
02.	Lapangan Olahraga	3.12	8.59	11.71	0.20
03.	Kuburan	6.48	7.02	13.50	0.23
04.	Perkantoran	9.67	11.29	20.96	0.36
05.	Pendidikan	8.10	5.77	13.87	0.24
06.	Kesehatan	16.51	6.60	23.11	0.40
07.	Sarana Ibadah	7.24	7.63	14.87	0.26
08.	Hotel	3.19	4.06	7.25	0.13
09.	Pasar, Pertokoan, Terminal	67.18	91.20	158.38	2.75
10.	Tempat Hiburan	0.10	12.34	12.44	0.22
11.	Industri	20.20	10.75	30.95	0.54
12.	Sawah	934.63	299.17	1233.80	21.41
13.	Perkebunan Rakyat	66.54	73.98	140.52	2.44
14.	Kebun Campuran	377.15	257.63	634.78	11.01
15.	Semak, Alang-alang	353.44	350.02	703.46	12.20
16.	Hutan	842.89	515.94	1358.83	23.57
17.	Tegalan	201.30	123.27	324.57	5.63
18.	Kolam Ikan, Rawa	10.55	10.45	21.00	0.36
19.	Lain-lain	57.50	159.28	216.78	3.76
Jumlah / Total		3.500	2.264	5.764	100.00

Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2012

Di samping itu, Kota Solok mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh angin Barat, yang tidak jauh berbeda dengan kota-kota di Sumatera Barat pada umumnya, dengan temperatur udara rata-rata terendah mencapai 26,1⁰C dan temperatur udara tertinggi mencapai 28,9⁰C.

Adapun sumber air yang terdapat di Kota Solok, terdiri dari mata air, air tanah dangkal dan sungai (air permukaan), dimana Kota Solok dilewati oleh 3 aliran sungai yaitu Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Binguang yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perikanan dan kegiatan rumah tangga, dan sebagai sumber air bersih.

Tabel 2.3. Panjang Sungai di Kota Solok

No	Sungai Utama	Panjang (m)
1.	Batang Sumani	9.155
2.	Batang Gawan	3.125
3.	Batang Binguang	2.650

Sumber : Dokumen RTRW Kota Solok

b. Aspek Demografi

Kota Solok berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 mempunyai penduduk berjumlah 59.396 jiwa dengan laju pertumbuhan antar sensus rata-rata 2,13 persen. Sedangkan menurut hasil verifikasi dan validasi data registrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok (Disdukcapil) pada tahun 2011, jumlah penduduk Kota Solok telah berjumlah 66.753 jiwa. Lebih jauh terkait penduduk, apabila ditinjau dari perbandingan penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, data dari Disdukcapil Kota Solok memperlihatkan perbandingan penduduk sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Penduduk Kota Solok
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

NO.	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
I	0 – 14 Tahun	9.798	9.153	18.951
II	15 – 64 Tahun	22.138	21.600	44.738
III	65 Tahun keatas	1.827	2.267	4.094
TOTAL		33.733	33.020	66.753

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2012

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berumur antara 15 - 64 tahun mencapai 44.738 jiwa atau mencapai 67,02 % dari total registrasi jumlah penduduk tahun 2011, dan penduduk berumur 0 – 14 tahun mencapai 18.951 jiwa atau 28,39 % dari total registrasi jumlah penduduk tahun 2011, serta penduduk berumur 65 tahun keatas sebanyak 4.094 jiwa atau 4,59 %. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Solok, relatif lebih banyak penduduk pada kelompok usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk non usia produktif.

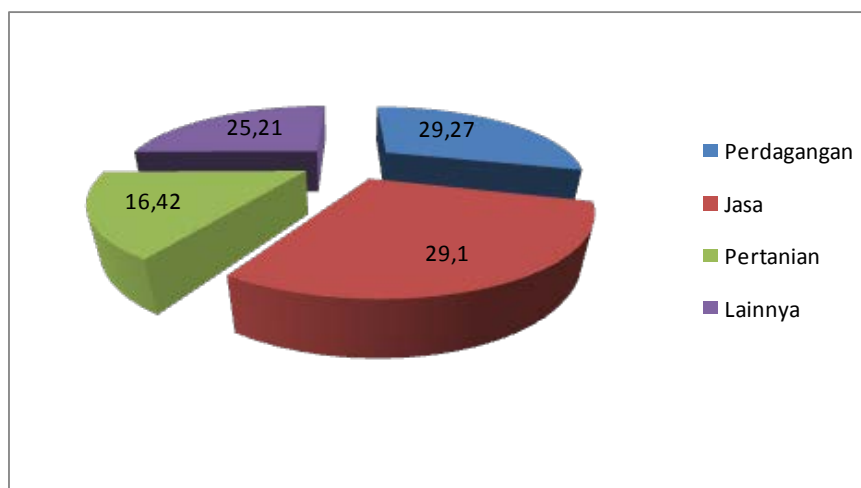
Oleh karena itu, dilihat dari ketersediaan tenaga produktif Kota Solok, yaitu yang berada pada kelompok umur 15 – 49 tahun berjumlah 32.532 jiwa atau 87,28 % dari jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun. Sementara, dari data aktivitas penduduk usia 15 tahun keatas pada Tahun 2010, diketahui 63,21 % merupakan angkatan kerja dan 36,79 % saja yang bukan angkatan kerja sehingga diperkirakan dalam 10 tahun mendatang, Kota Solok belum akan mengalami kekurangan stok tenaga produktif.

Mayoritas penduduk usia produktif Kota Solok, lebih kurang 74,79 %, bekerja pada tiga lapangan kerja utama, yaitu :

- Lapangan usaha perdagangan \pm 29,27 %, dengan penyerapan tenaga kerja perempuan 36,93 % dan tenaga kerja laki-laki 24,62 %;
- Lapangan usaha jasa \pm 29,10 %, dengan penyerapan tenaga kerja perempuan 36,51 % dan tenaga kerja laki-laki 24,59 % ;
- Lapangan usaha pertanian \pm 16,42 %, dengan penyerapan tenaga kerja perempuan 16,56 % dan tenaga kerja laki-laki 16,33 %.

Sedangkan 25,21 % bekerja pada lapangan usaha lainnya. Kondisi penyerapan tenaga kerja ini sekaligus menunjukkan aktivitas ekonomi Kota Solok yang dominan sektor jasa dan perdagangan dengan dukungan sektor pertanian.

Grafik 2.1
Persebaran Angkatan Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Solok



Sumber : BPS Kota Solok

Secara lebih lengkap gambaran lapangan usaha penduduk usia produktif Kota Solok tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Usia Produktif Menurut Sektor Usaha Tahun 2012

No	Lapangan Usaha	Penduduk (%)		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	5,44	4,51	9,95
2	Pertambangan/penggalian	0,23	0,23	0,46
3	Industri	3,57	1,05	4,62
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0,60	-	0,60
5	Konstruksi	6,04	0,13	6,17
6	Transportasi dan Komunikasi	6,77	0,51	7,28
7	Perdagangan	16,08	16,00	32,08
8	Bank dan Lembaga Keuangan	1,41	0,58	1,99
9	Jasa – jasa	18,57	15,99	34,56
10	Lain-lain	0,98	1,31	2,29
Jumlah		59,69	40,31	100,00

Sumber : BPS Kota Solok

Adapun jika dilihat perbandingan penduduk antar kecamatan, maka diketahui jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan. Akan tetapi, dari sisi kepadatan penduduk justru sebaliknya, penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih padat dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagaimana terlihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Solok Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/Km²)
Lubuk Sikarah	35.00	33.580	959
Tanjung Harapan	22.64	27.141	1.199
Kota Solok	57.64	60.721	2.158

Sumber : BPS Kota Solok Tahun 2011

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Untuk melihat gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat ini, dilakukan analisis terhadap indikator variabel yang mempengaruhinya.

Adapun hasil analisis terhadap masing-masing indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

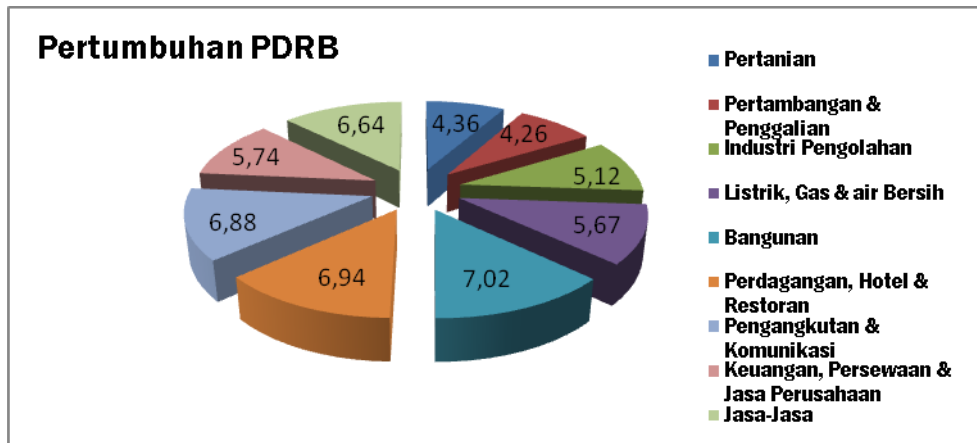
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk melihat perkembangan ekonomi daerah dilakukan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB

Dibidang pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Jika dilihat pertumbuhan PDRB Kota Solok tahun 2012 yakni sebesar 6,33% mengalami peningkatan yang kurang signifikan dibanding tahun 2011 yang hanya tercapai sebesar 6,078%. Terjadinya peningkatan pertumbuhan PDRB ini, dikarenakan terjadinya peningkatan pertumbuhan di beberapa sektor perekonomian yakni sektor pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan PDRB Kota Solok tahun 2012 berada di bawah laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 6,35%. Bila dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor, terlihat bahwa pada tahun 2012, sektor bangunan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 7,02%. Sedangkan sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang terendah dibanding sektor lainnya yakni hanya tumbuh sebesar 4,26%, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.2
Pertumbuhan PDRB Kota Solok per Sektor Tahun 2012



Sumber : BPS Kota Solok

2. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah faktor ekonomi lainnya yang dianalisis untuk melihat capaian kinerja fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pengendalian laju inflasi termasuk dalam kebijakan moneter yang merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. Namun tidak terlepas juga peranan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga dipasaran. Berdasarkan data Bank Indonesia angka inflasi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,2% dengan range $\pm 1\%$.

3. PDRB per Kapita

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita tahun 2012 adalah sebesar Rp.22.368.166,-. Meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar Rp.20.413.094,12,-. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu kesehatan, yang diukur dengan usia harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat ekonomi dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Pengukuran angka IPM dilakukan secara nasional, angka IPM Kota Solok tahun 2011 adalah sebesar 76,04, dengan menempati rangking 5 di Provinsi Sumatera Barat. Capaian angka IPM tersebut cukup jauh diatas IPM Provinsi Sumatera Barat yakni dengan capaian hanya sebesar 74,28.

B. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa sektor yang memberikan kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah sektor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan. Untuk melihat tingkat keberhasilannya dilakukan analisis kinerja terhadap ketiga sektor tersebut dari beberapa indikator diantaranya adalah Angka Melek Huruf (AMH), Angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C, Tingkat Kelulusan, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, persentase balita gizi buruk, dan masing-masing sektor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan Bidang Pendidikan di Kota Solok dapat dilihat dari capaian indikator diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Capaian Indikator Bidang Pendidikan
Kota Solok Tahun 2012**

NO	Indikator Capaian Kinerja	2012
1	Angka Melek Huruf (AMH)	99,64%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) - SD - SLTP - SLTA	101,32% 88,69% 116,09%
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD - SLTP - SLTA	119,6% 129,56% 180,10%
4	Tingkat Kelulusan - SD - SLTP - SLTA	100% 99,03% 85,85%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok

2. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan pada tahun 2012 di Kota Solok dapat dilihat dari capaian indikator kinerja diantaranya sebagai berikut ; angka harapan hidup mencapai 69,5 Th, angka kematian bayi 9,18 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan 250,4 per 100.000 kelahiran hidup, persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 92,36%, kelurahan yang tercakupi imunisasi 100%, prevalensi gizi kurang pada balita 6,25%, rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat mencapai 70% dan pada umumnya ketersediaan obat sudah terpenuhi di seluruh Puskesmas.

3. Kemiskinan

Hingga kini, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan garda depan dunia, tidak hanya di Kota Solok, Indonesia bahkan dunia, tetapi ia menjadi permasalahan terbesar pembangunan di abad ke-21 ini. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani setiap tahunnya, karena merupakan masalah yang kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan tidak

hanya berhubungan dengan pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja tetapi akan ditentukan oleh banyak faktor yang membuat masyarakat tidak berdaya baik dari sisi ekonomi maupun dalam bersosialisasi dalam kehidupan sosialnya. Berdasarkan hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 oleh BPS, jumlah Rumah Tangga di Kota Solok yang masuk dalam program perlindungan sosial tersebut adalah berjumlah 2.774 RT yang telah dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Keluarga Miskin Tahun 2011-2012

Kecamatan		Jumlah Kepala Keluarga Miskin			Jumlah
		Paling Miskin (Klp 1)	Hampir Miskin (Klp 2)	Rentan Miskin (Klp 3)	
I	Lubuk Sikarah	497	628	556	1.681
1	Tanah Garam	299	343	316	958
2	Enam Suku	44	73	55	172
3	Sinapa Piliang	19	10	5	34
4	IX Korong	19	15	24	58
5	KTK	15	23	30	68
6	Aro IV Korong	11	38	42	91
7	Simpang Rumbio	90	126	84	300
II	Tanjung Harapan	206	408	479	1.093
1	Koto Panjang	8	37	45	90
2	PPA	22	38	70	130
3	Tanjung Paku	101	107	83	291
4	Nan Balimo	35	114	141	290
5	Kampung Jawa	23	77	97	197
6	Laing	17	35	43	95
Total		703	1.036	1.035	2.774

Sumber: TNP2K Data PPLS 2011

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni, budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Sampai dengan tahun 2012 jumlah grup kesenian sebanyak 20 grup, jumlah klub olahraga sebanyak 59 klub dan jumlah lapangan olahraga sebanyak 92 buah yang terdiri dari lapangan sepak bola, tenis, bola basket, bulutangkis, voli, tenis meja dan sepak takraw serta lapangan futsal.

Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan seni dan budaya pada tahun 2012, sebagai berikut:

1. Event Baralek Gadang
2. Event Rentak Kemilau Nusantara
3. Pagelaran Seni Budaya
4. Pekan Budaya Sumbar
5. Penampilan Seni Budaya pada Event Pesta Tabuik Pariaman
6. Festival Randang Tingkat Sumbar
7. Penampilan Seni Budaya di Mataram
8. Misi Kesenian di Taman Mini

Sementara itu, untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olah raga baik yang dilaksanakan di Kota Solok maupun yang diikuti oleh kontingen/atlet dari Kota Solok pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: olah raga prestasi yang diikuti oleh siswa dari Kota Solok, Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Sumatera Barat, Liga Pendidikan Indonesia (LPI) serta kegiatan pertandingan yang diadakan oleh masing-masing Pengurus Cabang (Pengcab) Olah Raga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pendidikan. Urusan pendidikan ini dilaksanakan melalui 3 program, yaitu program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, program manajemen pelayanan pendidikan dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu, penyelenggaraan pembangunan pada urusan pendidikan dilihat dari beberapa indikator seperti perkembangan jumlah sekolah dan kelas, jumlah guru dan murid, angka kelulusan, serta peningkatan kompetensi guru seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Indikator Fokus Layanan Urusan Pendidikan Kota Solok Tahun 2011-2012

NO	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	2011	2012
1.	Jumlah Sekolah			
	- SD/MI		45	45
	- SLTP/MTs		8	8
	- SLTA/MA		12	12
2.	Jumlah Kelas/Rombel			
	- SD/MI		334	340
	- SLTP/MTs		143	270
	- SLTA/MA		183	215
3.	Jumlah Murid			
	- SD/MI		8.757	8.824
	- SLTP/MTs		4.242	4.810
	- SLTA/MA		6.504	6.711
4.	Jumlah Guru			
	- SD/MI		639	644
	- SLTP/MTs		339	393
	- SLTA/MA		684	701
5.	Angka kelulusan UN			
	1) SD	%	94,48	100
	2) SLTP	%	96,27	99,03
	3) SLTA	%	98,93	99,75

NO	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	2011	2012
6.	Sertifikasi Guru (Pemerintah Pusat)			
	1) SD/SLTP	%	42,42	49,92
	2) SLTA	%	59,79	72,47
7.	Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/DIV			
	- SD/MI	%	59,15	67,85
	- SLTP/MTs	%	83,72	88,04
	- SLTA/MA	%	97,66	97,62

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok

Pada tahun 2011 ke 2012 terjadi peningkatan pada layanan urusan pendidikan, baik jumlah kelas, guru dan siswa pada setiap jenjang pendidikan. Disamping itu juga dicapai peningkatan kompetensi guru yang ditandai dengan peningkatan persentase jumlah guru yang berkualifikasi setara S1/D4, dimana pada tahun 2012 jumlahnya sudah melebihi 80% untuk SLTA dan SLTP. Namun ke depan untuk tingkat SD masih perlu ditingkatkan jumlah guru yang berkualifikasi setara D4/S1 ini. Juga masih diperlukan program percepatan peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi serta upaya untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan guna mencapai peningkatan kualitas pendidikan.

2. Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pada bidang kesehatan, sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RPJM dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dilakukan melalui upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya rasio ketersediaan puskesmas, medis dan paramedis terhadap jumlah penduduk, meningkatnya cakupan kunjungan masyarakat ke puskesmas, menurunnya persentase balita gizi kurang dan beberapa indikator lainnya seperti yang digambarkan pada data berikut ini.

**Tabel 2.10 Indikator Fokus Layanan Urusan Kesehatan Kota Solok
Tahun 2011-2012**

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	2011	2012
1.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk		1:15.180	1:14.848
2.	Rasio Posyandu per satuan balita		77	78
3.	Rasio Medis per satuan penduduk		1:1.687	1:697
4.	Rasio Paramedis per satuan penduduk		1:474	1:471
5.	Cakupan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas (visit rate)	Kali kunjungan	1,23	1,35

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	2011	2012
6.	Persentase balita gizi kurang	%	8,74	6,25
7.	Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	%	99,7	92,36
8.	Desa Universal Child Immunization (Desa/Jorong/Kelurahan cakupan imunisasi)	%	100	100
9.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	44	47
10.	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	%	67	70

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Secara umum kondisi derajat kesehatan masyarakat Kota Solok seiring dengan pembangunan di bidang kesehatan yang dilakukan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ketersediaan sarana puskesmas dan ketersediaan tenaga medis dan paramedis merupakan upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, persentase kasus balita gizi kurang akan semakin menurun, kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas juga akan meningkat.

3. Pekerjaan Umum

Jalan merupakan faktor penunjang utama pembangunan, baik pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun infrastruktur lain. Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2011 s/d 2012 dapat terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Perkembangan Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2012

No	Keadaan	Panjang Jalan (Km)	
		2011	2012
1	Kondisi Baik	97,904	106,021
2	Kondisi Rusak Sedang	43,331	39,459
3	Kondisi rusak	20,470	19,070
4	Kondisi rusak Berat	38,835	35,990
5	Jalan secara keseluruhan	200,540	200,540

Sumber : Dinas PU Kota Solok tahun 2012

Sebagai simpul transportasi dan sebagai kota transit, di samping terminal angkutan orang, Kota Solok membutuhkan terminal truk yang dapat melayani bongkar muat barang. Saat ini pemerintah Kota Solok telah mulai mencari alternatif lokasi dan diharapkan lima tahun ke depan terminal ini telah dibangun dan dapat difungsikan.

4. Perumahan

Pembangunan sektor perumahan, dilakukan dengan memfasilitasi pengembang dalam rangka penyediaan perumahan masyarakat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari tumbuhnya beberapa perumahan dalam skala kecil dan sedang, yaitu kapling siap bangun. Berdasarkan pendataan tahun 2012 dapat dilihat jumlah tempat tinggal berdasarkan jenis konstruksi, sebagai berikut:

**Tabel 2.12 Jumlah Tempat Tinggal/Hunian
Berdasarkan Jenis Bangunan di Kota Solok Tahun 2011-2012**

Jenis Bangunan	2011			2012		
	Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan	Jumlah	Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan	Jumlah
Permanen	3.382	3.992	7.734	3.512	4.189	7.701
Semi Permanen	790	865	1.655	790	865	1.655
Temporer	798	785	1.583	798	785	1.583
Total	4.970	5.642	10.612	5.100	5.839	10.939

Sumber : Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah rumah hunian, di Kota solok pada tahun 2012 adalah sebesar 10.939 unit yang terdiri dari 5.100 unit di Kelurahan Lubuk Sikarah dan di kelurahan Tanjung Harapan sebanyak 5.839 unit.

5. Penataan Ruang

Koordinasi penataan ruang Kota Solok dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang anggotanya terdiri lintas SKPD. Tim ini bertugas mengkoordinasikan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Terkait dengan perencanaan tata ruang, Kota Solok telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012. Pada tahun 2013 ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dari aspek pemanfaatan ruang, penerbitan advice planning dan IMB merupakan salah satu alat kontrol pengendali pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang. Jumlah advice planning dan IMB yang diterbitkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13 Jumlah IMB dan Advice Planning
yang Diterbitkan Menurut Kecamatan Tahun 2011-2012**

Kecamatan	Jumlah IMB		Jumlah Advice Planning	
	2011	2012	2011	2012
Lubuk Sikarah	181	134	19	24
Tanjung Harapan	150	205	20	28
Jumlah	331	339	39	52

Sumber : Dinas Kebersihan & Tata Ruang

**Tabel 2.14 Jumlah bangunan yang memiliki IMB di Kota Solok
Tahun 2011-2012**

No	Kecamatan/Kelurahan	Jml bangunan ber IMB		Jml bangunan seluruhnya	
		2011	2012	2011	2012
1	Lubuk Sikarah				
	Tanah Garam	1.092	1.125	1.874	1.907
	VI Suku	562	605	1.019	1.062
	Sinapa Piliang	156	157	304	305
	IX Korong	173	176	414	417
	Aro IV Korong	404	422	535	553
	KTK	224	231	602	609
	Simpang Rumbio	941	970	1.390	1.419
2	Tanjung Harapan				
	PPA	774	788	1.204	1.218
	Koto Panjang	102	104	387	389
	Tanjung Paku	521	525	1.200	1.204
	Nan Balimo	835	932	1.555	1.652
	Kampung Jawa	605	655	1.660	1.710
	Laing	126	164	383	421
	Jumlah	6.515	6.854	12.527	12.866

Sumber : Dinas Kebersihan & Tata Ruang

6. Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pembangunan daerah, baik jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Solok berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan ini selama kurun waktu lima tahun ke belakang, Kota Solok telah menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek atau tahunan.

Untuk perencanaan jangka panjang, Kota Solok telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. RPJPD ini dituangkan ke dalam 5 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Saat ini Kota Solok telah berada pada RPJMD tahap kedua, yaitu RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, sedangkan tahun 2014 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD tahap kedua tersebut.

Pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Disamping dokumen-dokumen perencanaan, melalui urusan perencanaan pembangunan ini juga telah disusun laporan evaluasi kinerja pemerintahan yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD). LAKIP disampaikan kepada Pemerintah Pusat, LKPJ disampaikan kepada DPRD, LPPD disampaikan kepada Pemerintah Pusat sedangkan ILPPD disampaikan kepada masyarakat setiap tahunnya.

7. Perhubungan

Penyelenggaraan kewenangan pada urusan perhubungan dalam tahun 2012 telah memperlihatkan beberapa kemajuan, antara lain dilihat dari indikator berikut ini adalah peningkatan jumlah rambu-rambu dan marka jalan. Pada tabel berikut ini dapat dilihat tingkat kepadatan jalan dengan volume kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.15 Data Kecepatan Setempat (Spot Speed) Tahun 2012

No	Jalan	Volume	Kecepatan Rata-rata Kendaraan/Jam			
			Mobil Pribadi	Sepeda Motor	Bus	Truk
1.	Jalan Batas Kota – Bandar Pandung	108,4	35,87	45	0	37,42
2.	Jalan Batas Kota - Panyakalan	85,6	35,87	45	0	37,45
3.	Jalan Batas Kota – Saok Laweh	97,2	57,86	43,92	33,75	36,22
4.	Jalan Nasir (By Pass)	172,8	52,39	34,48	49,71	31,20
5.	Jalan Proklamasi	142,5	36,45	43,57	33,39	0
6.	Jalan Tembok Raya	102,3	36,57	32,33	0	29,31

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2012

Sedangkan jumlah kendaraan di Kota Solok Tahun 2011-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16 Jumlah Jenis Angkutan di Kota Solok Tahun 2011-2012

No	Jenis Kendaraan	2011	2012
1.	Mobil Penumpang	161	48
2.	Mobil Bus	20	-
3.	Mobil Barang (Truk)	55	812
4.	Bendi	80	57
5.	Becak Bermotor	52	38
6.	Ojek Roda Dua	200	350
7.	Angkot/Oplet	62	54

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2012

8. Lingkungan Hidup

Volume timbunan sampah Kota Solok pada tahun 2011 mencapai 166.490 m³/hari yang terdiri dari sampah organik sebesar 71,90% dan sisanya adalah sampah anorganik. Untuk mengurangi timbunan sampah dan melakukan upaya penerapan pola 3R (reduce, reuse dan recycle) telah dilakukan pengomposan oleh masyarakat di beberapa lokasi yaitu :

- Di kelurahan IX Korong, Transad-Kampung Jawa dan perumahan Nusa Indah Tanah Garam sudah dilakukan pengomposan selama 3 (tiga) tahun.
- Di Taratak, Tanah Garam pengomposan dilakukan sejak tahun 2010
- Di Gawan-Tanah Garam, Laing, Simpang Rumbio dan Tanjung Paku baru dilakukan pengomposan sejak tahun 2011.

Terkait dengan usaha/aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan, yang perlu mendapat perhatian adalah limbah cair dari industri tahu. Selama ini penanganan terhadap limbah industri masih diperlakukan seperti limbah domestik rumah tangga karena industri di Kota Solok mayoritas berskala kecil. Namun khusus untuk industri tahu perlu ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke lingkungan. Hingga saat ini baru satu industri tahu yang memiliki IPAL namun karena kendala teknis IPAL-nya belum beroperasi optimal. Persentase efektifitas kinerja IPAL UKM baru mencapai 30%.

**Tabel 2.17 Jenis Kegiatan/Usaha
yang Mempunyai Sarana Pengolahan Limbah Tahun 2011-2012**

No	Jenis kegiatan/usaha	2011		2012	
		Jumlah usaha	Sarana pengolahan	Jumlah usaha	Sarana pengolahan
1	Industri tahu	7	2	8	2
2	Bengkel service/cucian	13	2	4	2
3	Rumah sakit	2	1	2	2
	RSB/RSIA	3	1	3	3
4	Puskemas	4	-	4	-
	Pustu		-		
5	Laboratorium			2	2

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup

Dari segi pemantauan status mutu air, sudah terlaksana 77,78%. Sementara cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal atau UKL/UPL sudah mencapai 70,6%.

9. Pertanian

Secara umum kewenangan urusan pertanian belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena kewenangan ini sebagian besar masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi tanah. Sebagian

kewenangan yang telah dilakukan adalah berkaitan dengan penyediaan lokasi untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.

**Tabel 2.18 Daftar Realisasi Pengadaan Tanah Aset
Pemerintah Kota Solok Tahun 2011-2012**

No	Peruntukan	Lokasi	Luas (m2)
Tahun 2011			
1	Pembebasan tanah jalan lingkar utara	Kampung Jawa	253
	a. Bagindo Syafri	Laing	9.435
	b. Zulbahri MI Bungsu	Laing	170
	c. Marnis	Laing	1.327
	d. Hj. Ermayati (Kuasa kepada Zulfahmi)	Laing	570
	e. Limarni	Laing	1.182
	f. Sukris		
Tahun 2012			
1	Pembebasan lahan untuk pembangunan RPH	Kampung Jawa	11.970

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan catatan sipil bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. Urusan ini melakukan upaya dan langkah-langkah serta menyikapi respon dan harapan masyarakat melalui :

1. Dokumen kependudukan diantaranya: Pemutakhiran data kependudukan, Penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
2. Surat keterangan kependudukan seperti lahir, mati, pindah dan datang (Lampid)

Dalam pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan indikator kinerja program dalam RPJMD adalah :

- a. Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk
- b. Rasio bayi berakte kelahiran yang lahir di Kota Solok, diharapkan bahwa masyarakat lebih memperhatikan tentang pelaporan dan pencatatan akta pencatatan sipil, khususnya pencatatan kelahiran agar tidak melebihi jangka waktu 60 hari sehingga dapat ditingkatkan tertib administrasi.
- c. Rasio pasangan berakte nikah sesuai prosedur ketentuan berlaku

**Tabel 2.19 Indikator Kinerja
Program Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2011-2012**

Uraian	2011	2012
Rasio penduduk ber-KTP	74	85
Rasio bayi ber-akte kelahiran	60	78
Rasio penduduk akte nikah	86	88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan untuk capaian target tahun 2012 perlu ditingkatkan realisasi capaian indikatornya agar kinerja pelayanan dapat mencapai target pada tahun 2015 sebesar 100%.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Organisasi ini aktifitasnya berbasis perempuan dengan meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender melalui pembinaan antara lain :

1. Sosialisasi PUG yang dirasakan oleh masyarakat tentang perlu adanya kesetaraan gender dalam mencapai keberhasilan masyarakat dan keluarga untuk membina keluarga dan masyarakat
2. Pembinaan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) yang merupakan salah satu upaya untuk pengembangan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat dimana perempuan sebagai motor penggerak.
3. Sosialisasi peningkatan SDM perempuan di 13 kelurahan.
4. Sosialisasi Pengembangan pelayanan terpadu dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) yang merupakan wadah konsultasi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penanganan masalah KDRT dan anak sesuai dengan masalahnya.

Untuk perlindungan anak sampai saat ini tetap menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Akses anak terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan merupakan tanggung jawab bersama sehingga semua anak dapat dilayani. Untuk jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif sebanyak 2 orang, jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintah sebanyak 218 orang, jumlah organisasi perempuan sebanyak 27 organisasi dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT) adalah untuk kasus pidana sebanyak 2 orang, dan KDRT sebanyak 8 orang.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas dalam upaya menurunkan angka kelahiran, angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah reproduksi. Untuk jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 10195 orang dan jumlah pasangan yang ikut KB sebanyak 7381 orang. Realisasi capaian indikator kinerja program RPJMD pada tahun 2012 adalah:

1. Cakupan peserta KB aktif sebesar 72,39%,
2. Menurunnya Unmet Need sebesar 13,24%,
3. Menurunnya angka kelahiran sebesar 3,53% ,
4. Turunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi 2,12 %

Untuk Realisasi target indikator kinerja program pada tahun 2012 sudah melebihi capaian target untuk tahun 2015.

13. Sosial

Persoalan kemiskinan di Kota Solok merupakan gejala yang lebih rumit dan meliputi lebih banyak aspek daripada hanya sekedar kekurangan pendapatan belaka, kemiskinan juga berhubungan dengan kepemilikan lahan yang sempit, kondisi geografis, tingkat pendidikan, serta sikap mental yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Tabel 2.20 Data Layanan Urusan Sosial Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Rumah Singgah	5	5
Jumlah organisasi Sosial	3	3
Jumlah PMKS	2.907	*
Posyandu Lansia	31	33

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Solok

Capaian indikator kinerja program dalam RPJM pada tahun 2012 adalah:

1. Persentase angka kemiskinan (KK miskin) sebesar 11,6 %
2. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina dan mandiri sebesar 32,52%.
3. Jumlah sarana sosial (panti asuhan, rumah singgah, panti jompo) sebanyak 7 buah.

Realisasi capaian target indikator kinerja program pada tahun 2012 sudah melebihi capaian target untuk tahun 2015.

14. Ketenagakerjaan

Berbagai Upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran antara lain dengan memfasilitasi ke akses modal usaha, pelatihan keterampilan dan memperluas lapangan kerja khususnya pada sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan, namun usaha tersebut belum cukup efektif untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kota Solok. Berdasarkan tabel di bawah ini ternyata pada tahun 2012 tingkat pengangguran di Kota Solok meningkat dari 6,27% pada tahun 2012 menjadi 6,31% tahun 2013. Angka pencari kerja juga meningkat dari tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja yang mengakibatkan jumlah pengangguran juga semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, perlu upaya yang lebih intensif untuk mengurangi jumlah pengangguran antara lain dengan memfasilitasi ke akses modal usaha, pelatihan keterampilan dan memperluas lapangan kerja khususnya pada sektor perdagangan dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dengan mempertimbangkan potensi lokal yang ada.

Berikut data ketenagakerjaan tahun 2011-2012 :

Tabel 2.21 Ketenagakerjaan Kota Solok Tahun 2011 - 2012

No.	Umur	Tahun	
		2011	2012
1.	Angkatan Kerja	27.699	28.014
2.	Penduduk usia produktif	38.060	38765
3.	Pencari Kerja	5.408	5.628
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	92%	92,41%
5.	Jumlah Pengangguran	3.917	4.337
6.	Tingkat Pengangguran	6,27%	6,31%

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Solok, 2013

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil yang menjadi kewenangan pemerintah kota sudah dilaksanakan. Berikut data perkembangan koperasi 2011-2012:

Tabel 2.22 Perkembangan Koperasi di Kota Solok 2011-2012

No.	Uraian	Satuan	Tahun	
			2011	2012
1	Jml. Koperasi	Buah	63	64
2	Jml. Koperasi Aktif	Buah	47	48
3	Jml. Koperasi tidak Aktif	Buah	16	16
4	Jumlah Anggota	Orang	6.352	10.493
5	Modal Sendiri	Rp. 000	29.870.360	37.264.277
6	Hutang	Rp. 000	31.735.437	30.844.761
7	Total Asset	Rp. 000	61.605.718	83.948.633
8	Volume Usaha	Rp. 000	55.221.118	61.453.417
9	SHU	Rp. 000	3.747.252	3.903.254
10	Klasifikasi Koperasi			
	- A	Buah	10	10
	- B	Buah	19	19
	- C	Buah	20	19
	- D	Buah	16	16
11	Tkt. Kesehatan KSP/USP Koperasi			
	- Sehat	Buah	5	12
	- Cukup Sehat	Buah	17	24
	- Kurang Sehat	Buah	41	-
12	Pelaksanaan RAT	Buah	37	36

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, sepanjang tahun 2012 perkembangan koperasi di Kota Solok menunjukkan trend yang positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan dalam hal jumlah koperasi, jumlah anggota, volume usaha dan SHU dari koperasi-koperasi yang ada di Kota Solok.

Dilihat dari perkembangan modal koperasi, terjadi peningkatan sebanyak 19,84%, demikian juga dengan total asset dari koperasi juga terjadi peningkatan sebesar 26,61%. Tetapi jika lihat dari perkembangan SHU dan volume usaha masih belum begitu signifikan kenaikannya yaitu sebesar 4% dan 10%. Hal ini disebabkan masih rendahnya diversifikasi usaha dari koperasi yang ada. Untuk itu pembinaan yang intensif masih sangat dibutuhkan.

Berkaitan dengan keberadaan UKM di Kota Solok, pada saat ini terdapat 1.006 unit UKM yang bergerak di bidang perdagangan, industri pertanian, non pertanian dan aneka usaha. Berikut data perkembangan UKM 2011-2012:

Tabel 2.23 Perkembangan UKM di Kota Solok 2011-2012

No.	Jenis Usaha	Satuan	Tahun	
			2011	2012
1	Jumlah UKM	Unit	839	1.006
2	Modal Sendiri	Rp. 000	71.088.270	78.197.100
3	Modal Luar	Rp. 000	47.138.135	51.851.950
4	Total Assets	Rp. 000	104.521.092	114.973.200
5	Omzet	Rp. 000	225.190.152	247.709.200
6	Tenaga Kerja	Orang	2.062	2.269

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok Tahun 2013

Usaha Kecil dan Menengah di Kota Solok pada tahun 2012 memperlihatkan trend yang positif. Dimana terdapat 167 UKM baru pada tahun 2012. Demikian juga jika dilihat dari perkembangan modal, total asset, omzet dan jumlah tenaga kerja dengan rata-rata perkembangan sebesar 9% dinilai potensial untuk dapat dikembangkan. Namun jika dilihat dari rata-rata total omzet UKM yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa UKM yang ada masih bersifat kecil dengan skala rumah tangga yang masih memerlukan pembinaan dan bimbingan yang intensif baik dalam hal produksi, pemasaran maupun dalam hal keberlanjutan produk yang dihasilkan.

16. Penanaman Modal

Perkembangan penanaman modal di Kota Solok sampai tahun 2012 walaupun masih belum menggembirakan namun sudah memperlihatkan pertumbuhan sebesar 2,5% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2011 yaitu sebesar 2,3% dimana investasi masih didominasi oleh investasi pemerintah. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya minat untuk melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Masalah ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 2.24 Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA Kota Solok
Tahun 2011-2012 (Rp. Milyar)**

No	Jenis investasi	2011	2012
1	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	239.265.785.411	250.449.804.259
2	Penanaman Modal Asing	-	-
	Total	239.265.785.411	250.449.804.259

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Solok, 2013

Tabel 2.25 Jumlah Investasi di Kota Solok Tahun 2011-2012

No	Jenis investasi	2011	2012
1	Pemerintah	82.623.985.579	35.776.186.915
2	Swasta	156.641.799.832	214.673.617.344
	Total	239.265.785.411	250.449.804.259

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Solok

Disamping itu, untuk UMKMK juga memperoleh kredit/pembiayaan untuk melakukan kegiatan usaha produktif sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih produktif. Jenis kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha yang produktif yang layak namun belum bankable, dengan plafond kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.

Tabel 2.26 Penyaluran dana KUR di Kota Solok Tahun 2012

No	Nama Bank	Jumlah Nasabah	Plafond(Rp)
1.	Bank Nagari	155	5.247.000.000
2.	Bank Mandiri	7	2.765.000.000
3.	BRI	1.579	15.265.712.238
4.	BNI	16	3.589.000.000
Total		1.757	26.866.712.238

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Rp. 26.866.712.238,- dana KUR beredar di Kota Solok untuk 1.757 UKM yang ada di Kota Solok.

17. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai adat budaya ditengah masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya dan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan, melalui kegiatan penyelenggaraan even/kegiatan seni dan budaya, pembinaan kelompok-kelompok adat dan budaya serta pelestarian peninggalan budaya serta benda-benda cagar budaya dengan perkembangan indikator sebagai berikut.

**Tabel 2.27 Indikator Fokus Layanan Urusan Kebudayaan Kota Solok
Tahun 2011-2012**

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	2011	2012
1.	Jumlah dokumen pelestarian nilai-nilai adat budaya	Buah	1	1
2.	Jumlah panggung pidato adat yang aktif	Klp	20	20
3.	Jumlah sanggar seni	Klp	13	20
4.	Jumlah penyelenggaraan even/festival seni dan budaya skala lokal kota	Kali	27	21
5.	Jumlah penyelenggaraan even/festival seni dan budaya skala regional	Kali		3
6.	Jumlah penyelenggaraan even/festival seni dan budaya skala nasional	Kali		2
7.	Jumlah penyelenggaraan even/festival seni dalam rangka mendukung prestasi daerah	Kali	10	12
8.	Jumlah benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi	Buah	10	8

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok

Penyelenggaraan even/festival Seni dan Budaya di Kota Solok yang dilakukan meliputi kegiatan/penampilan mingguan di RTH (taman kota) yang menampilkan kesenian randai, saluang dendang, qasidah rabana serta penampilan kreativitas musik anak-anak sekolah. Even festival budaya yang diselenggarakan adalah even baralek gadang dan kemilau nusantara. Sedangkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Solok meliputi Lasuang Inyik Gulambai, Lasuang Jawi Orok, Makam Syech Sialahan, Lasuang Baiduang, Batu Laweh, Batu Nan Tujuh, Surau Latiah, dan Rumah Gadang Gajah Maaram.

18. Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olah raga serta meningkatkan kompetensi kelembagaan pemuda dan olahraga melalui penyelenggaraan sentra-sentra pembinaan atlit dan penyediaan dana bantuan operasional bagi organisasi kepemudaan. Adapun jumlah atlit dan cabang olahraga yang dibina baik oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata maupun oleh KONI selama tahun 2011 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.28 Jumlah Atlet yang dibina di Masing-masing
Cabang Olahraga Tahun 2011-2012**

No	Cabang Olah Raga	Jumlah Peserta			
		Siswa SLTA (orang)		KONI (orang)	
		2011	2012	2011	2012
1.	Atletik	20	20	28	27
2.	Sepak bola	22	22	20	35
3.	Bola Basket	20	20	11	25
4.	Bola Volley	24	24	26	49
5.	Sepak Takraw	10	10	-	15
6.	Pencak Silat	16	16	10	16
7.	Bulu Tangkis	15	15	12	13
8.	Taekwondo	-	-	12	20
9.	Karate	-	-	6	22
10.	Kempo	-	-	12	18
11.	Menembak	-	-	7	24
12.	Catur	-	-	5	12
13.	Balap Sepeda	-	-	6	14
14.	Tenis Meja	-	-	10	10
15.	Wushu	-	-	5	8
16.	Tenis Lapangan	-	-	10	29
17.	Tinju	-	-	7	10
18.	Panjat Tebing	-	-	7	10
19.	Bridge	-	-	-	16
20.	Senam	-	-	-	21
21.	Gulat	-	-	-	18
22.	Tarung Derajat	--	-	-	21
23.	Balap Motor	-	-	-	6
Jumlah		127	127	194	439

Sumber : - Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok
- KONI Kota Solok

Melalui kegiatan pembinaan tersebut baik pembinaan melalui sentra maupun pembinaan melalui klub olahraga, atlit-atlit kontingen Kota Solok berhasil meraih 6 medali emas, 14 m edali perak dan 25 medali perunggu pada POR Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 lalu. Adapun even-even yang pernah diikuti pada tahun 2012 antara lain adalah:

- PORProp Sumatera Barat di Kabupaten 50 Kota
- PON Di Pekanbaru

- Kejurda Tenis Lapangan, Kejurnas Tenis Lapangan, Kejurnas Tinju Junior dan Lomba lintas alam, dan sebagainya

Di Bidang Kepemudaan pada tahun 2012 terdapat 19 Organisasi kepemudaan (OKP) yang terdiri dari 6 OKP dan 13 organisasi kepemudaan yang terdapat di setiap kelurahan seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Solok Tahun 2011-2012

NO	ORGANISASI PEMUDA	2011	2012
1.	OKP	6	17
2.	Organisasi Pemuda Kelurahan	13	13
Jumlah		19	30

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok

Tabel 2.30 Nama Organisasi Pemuda di Kota Solok Tahun 2012

NO	TAHUN 2012
1.	Garda Anak Nagari (GAN) Kota Solok
2.	Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pncasila (MPC-PP) Kota Solok
3.	Gerakan Pemuda Al Washliyah Kota Solok

Sumber : Data Base Organisasi Kemasyarakatan Kota Solok, Badan Kesbangpolinmas, 2012

Bantuan dana penunjang operasional bagi organisasi pemuda di Kota Solok juga tetap dianggarkan yang pada tahun 2013 ini terletak pada pos bantuan dimana pencairannya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh organisasi pada tahun sebelumnya atas rekomendasi dari SKPD terkait.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat difokuskan kepada pemeliharaan ketertiban masyarakat serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap penyakit masyarakat. Selain itu kesatuan bangsa politik dalam negeri juga berkewajiban memberikan pendidikan dan pembinaan tentang politik kepada masyarakat agar organisasi masyarakat dan parpol dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Untuk jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sebanyak 78 organisasi dan jumlah organisasi politik/parpol sebanyak 9 parpol.

Realisasi capaian target indikator program pada tahun 2012 adalah:

1. Presentase pengurangan penyakit masyarakat sebesar 100%
2. Presentase partisipasi politik masyarakat sebesar 100%
3. Persentase gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar 8%
4. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, dan kenyamanan lingkungan sebesar 100%
5. Tingkat kesigapan penanggulangan bencana sebesar 75%

Dari realisasi capaian target kinerja program tahun 2012 sudah mencapai realisasi 100% dari target tahun 2015. Pada prinsipnya kondisi lingkungan cukup kondusif, yang dibuktikan dengan tidak adanya kejadian/konflik yang berarti.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah terus diupayakan. Hal ini terlihat dari SOTK yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang diimplementasikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2008. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2012 terdapat SOTK yang baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Solok, yang ditindaklanjuti dengan pengisian personil sesuai dengan SOTK tersebut.

Peningkatan profesionalisme aparatur terus diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional formal dan non formal. Untuk merespon kebijakan pemerintah pusat dibidang kepegawaian, sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota Solok menerapkan kebijakan moratorium pegawai, karena komposisi pegawai yang ada telah mencukupi fomasi yang tersedia. Sampai dengan tahun 2012, aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Solok berjumlah 2.868 orang yang terdiri dari 1.299 orang struktural dan 1.569 orang fungsional, menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang berjumlah 2.955 orang. Hal ini disebabkan karena adanya aparatur yang memasuki masa pensiun dan kebijakan moratorium pegawai. Tabel berikut menggambarkan komposisi pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok berdasarkan pendidikan, golongan dan eselon:

Tabel 2.31 Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan Pendidikan, Golongan dan Eselon keadaan Tahun 2011-2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah		Gol.	Jumlah		Eselon	Jumlah	
		2011	2012		2011	2012		2011	2012
1	S2	133	198	I	25	19	II	19	23
2	S1	1.433	1.554	II	751	658	III	88	93
3	D3	400	316	III	1.422	1.427	IV	346	354
4	D2	288	248	IV	757	764	V	10	10
5	D1	35	31				Staf	880	819
6	SLTA	614	478				fungsional	1.612	1.569
7	SLTP	30	25						
8	SD	22	18						
	Total	2.955	2.868	Total	2.955	2.868	Total	2.955	2.868

Sumber : BKD Kota Solok Tahun 2011-2012

Berdasarkan tabel 2.30 diatas, terlihat bahwa rasio S1 terhadap jumlah aparatur sampai dengan tahun 2012 adalah 54,18%, S2 terhadap jumlah aparatur adalah 6,90%, sedangkan sisanya sebesar 38,92% adalah berpendidikan D3,D2,D1,SLTA,SLTP dan SD. Dari data diatas, terlihat bahwa terdapat peningkatan rasio S1 terhadap jumlah aparatur meningkat dibanding tahun 2011 yang hanya mencapai 48,49%. Sedangkan untuk rasio S2 terhadap jumlah aparatur juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya mencapai 4,50%. Sementara rasio D3,D2,D1,SLTA,SLTP dan SD terhadap jumlah aparatur menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yakni 47,01%.

Disamping peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan formal, juga dilakukan melalui pendidikan nonformal (penjenjangan/diklat teknis/fungsional). Sampai dengan tahun 2012, aparatur yang telah mengikuti diklat penjenjangan/teknis/fungsional mencapai 16,84% meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya mencapai 16%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Solok cenderung meningkat. Peningkatan kapasitas ini didukung dengan terbukanya kesempatan bagi aparatur untuk tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis. Sedangkan untuk pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan melalui sistem pemberian reward dan punishment bagi pegawai.

Sejak Tahun 2011, telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam rangka peningkatan transparansi dan efisiensi anggaran. Untuk tahun 2012, terdapat 130 paket kegiatan yang dilaksanakan melalui ULP dan 115 paket kegiatan melalui LPSE. Sedangkan pada tahun 2011, hanya 103 paket kegiatan yang dilaksanakan melalui ULP dan 14 paket kegiatan melalui LPSE.

Di bidang pengelolaan keuangan daerah, upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan terutama pajak dan retribusi. Untuk tahun 2012, rasio PAD terhadap pendapatan daerah hanya mencapai 6,01% menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yakni sebesar 6,82%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah. Pada tahun 2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI. Hal ini terutama disebabkan karena masih belum tertibnya administrasi pengelolaan aset daerah.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilakukan oleh Inspektorat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu, pelaksanaan fungsi pengawasan juga melekat pada lembaga perwakilan rakyat daerah melalui peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga legislatif. Pada tahun 2012, terdapat 96 obrik yang diperiksa dengan jumlah temuan pemeriksaan 304 kasus meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah temuan hanya 272 kasus dengan 98 obrik pemeriksaan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Pada tahun 2012, tindak lanjut hasil temuan mencapai 80,41% menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yakni 82,28%. Hal ini dikarenakan sampai tahun 2012 terdapat beberapa temuan yang telah selesai ditindaklanjuti. Sementara itu rasio tenaga pengawas yang bersertifikasi pada tahun 2012 adalah 44% menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yakni 54%. Berkurangnya tenaga pengawas yang bersertifikat auditor ini

disebabkan karena beberapa auditor memasuki masa pensiun dan pengaruh kebijakan pemerintah daerah tentang moratorium pegawai.

Penyempurnaan produk hukum dengan memperhatikan kesesuaian dengan produk hukum yang lebih tinggi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Peningkatan kualitas ini didorong dengan telah dilaksanakannya training local legal drafting bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Solok sejak tahun 2007. Untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah telah dibentuk Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah dan pelaksanaan uji publik produk hukum kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD. Pada tahun 2012 terdapat 14 Peraturan Daerah dan 36 Peraturan Walikota yang dihasilkan, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 8 Peraturan Daerah dan 37 Peraturan Walikota. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum juga telah dilakukan melalui sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media masa dan elektronik.

Untuk meningkatkan pelayanan publik terutama perizinan, melalui Kantor Pelayanan Perizinan sampai dengan tahun 2011 terdapat 49 jenis perizinan yang dilayani dan telah memiliki SOP. Sedangkan untuk tahun 2012, hanya 40 jenis perizinan yang dilayani dan telah dilengkapi dengan SOP. Berkurangnya jenis perizinan yang dilayani disebabkan karena beberapa jenis izin dikembalikan ke SKPD yang bersangkutan sesuai dengan tupoksinya. Disamping itu jumlah izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.596 buah izin berkurang dibandingkan dengan tahun 2011 sejumlah 1.871 buah izin. Khusus untuk pelayanan perizinan, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Solok telah mendapatkan ISO 2008 terhadap 9 jenis perizinan yang dilayani, yang meliputi izin gangguan, SITU, IUJK, SIUP, TDP, TDI, TDG, IMB dan izin reklame. Disamping itu untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, telah dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM ini dilakukan melalui penyebaran kuisisioner kepada masyarakat yang mengurus izin. Pada tahun 2012, IKM untuk pelayanan perizinan adalah 80,80 yang berarti bahwa kinerja pelayanan perizinan telah memberikan persepsi yang positif pada masyarakat.

21. Ketahanan Pangan

Sistem Ketahanan Pangan, secara komprehensif meliputi ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh masyarakat, distribusi pangan yang lancar dan merata, konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang yang berdampak pada status gizi masyarakat.

Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan, maka kerja sama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat sangat diperlukan. Pemantapan ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui suatu kerja sama yang kolektif dari seluruh

pihak yang terkait (stakeholders), khususnya masyarakat produsen (petani), pengolah, pemasar dan konsumen pangan dan pemerintah.

Pada periode 2011-2012 total suplai energi dan protein per kapita per hari seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.32 Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2011 dan 2012

No	Tahun	Energi		Protein	
		Ketersediaan (Kkal/Kap/hari)	Tingkat ketersediaan (%)	Ketersediaan (Gram/Kap/hari)	Tingkat ketersediaan (%)
1	2011	3.397,59	154,44	107,05	187,81
2	2012	3.416,05	155,27	99,30	174,22

Keterangan :

Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.200 Kkal/kapita/hari

Angka Kecukupan Protein (AKP) = 57 gram/kapita/hari

Terjadinya penurunan ketersediaan protein tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari kelompok padi-padian, makanan berpati, ikan, minyak dan lemak. Angka penurunan ketersediaan tertinggi terdapat pada kelompok padi-padian. Hal ini disebabkan faktor berkurangnya luas lahan produktif untuk lahan pertanian dari tahun ke tahun menjadi areal perumahan, iklim yang kurang mendukung serta serangan hama.

Sedangkan untuk menggambarkan kemampuan penyediaan beberapa komoditas pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.33 Ketersediaan Pangan Strategis, Tahun 2011-2012

NO	Komoditas	Tahun 2011				Tahun 2012			
		Ton				Ton			
		Produksi	Total Keterse diaan Bahan Makanan	Produksi - Total Keterse diaan	(%)	Produksi	Total Keterse diaan Bahan Makanan	Produksi- Total Keterse diaan	(%)
1	Beras	11.066	9.632	1.434	114,89	7.458	6.422	1.036	116,13
2	Jagung	2.542	2.542	0	100,00	736	607	129	125,70
3	Ubi Kayu	1.872	2.572	-700	72,78	1.793	1.993	-200	89,96
4	Kedelai	0	1.050	-1.050	0,00	0,00	240	-240	0,00
5	Gula Pasir	0	1.540	-1.540	0,00	0,00	1.480	-1.480	0,00
6	Minyak Goreng Sawit	0	615	-615	0,00	0,00	522	-522	0,00
7	Sayuran								
	a. Cabai	262	329	-67	79,64	1.260	1.695	-435	74,34
	b. Bawang Merah	49	593	-544	8,26	326	1.049	-723	31,08
8	Buah								
	a. Jeruk	49	264	-215	18,56	130	226	-96	57,52
	b. Pisang	5.601	3.801	1.800	147,36	10.900	10.910	-10	99,91
9	Daging Sapi + Kerbau	975	975	0	100,00	494	494	0	100,00
10	Daging Ayam	814	814	0	100,00	106	699	-593	15,16
11	Telur	0	1.750	-1.750	0,00	5	3.003	-2.998	0,17
12	Susu	0	350	-350	0,00	0,00	450	-450	0,00
13	Ikan	92	654	-562	14,07	54	626	-572	8,63

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan

Pada tahun 2011 kondisinya menunjukkan ketersediaan beberapa komoditas lebih besar dibandingkan produksinya. Hal ini mengindikasikan adanya pemenuhan ketersediaan pangan yang berasal dari impor, seperti kedelai, gula pasir, minyak goreng sawit, bawang merah, jeruk, pisang, telur, susu dan ikan. Sedangkan komoditas pemenuhannya keseluruhan berasal dari impor karena tidak adanya produksi domestik adalah kedelai, gula pasir, minyak goreng sawit dan susu.

Sementara itu, pada Tahun 2012, komoditas yang produksinya lebih besar atau sama dengan ketersediaan adalah beras, jagung dan daging sapi + kerbau. Untuk komoditas yang keseluruhannya dipenuhi dari impor adalah kedelai, gula pasir, minyak goreng sawit, daging ayam, telur dan susu.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan, dengan sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan, tersedianya fasilitas permodalan bagi usaha mikro kelurahan, berkembangnya lembaga keuangan mikro yang berbasis mesjid dan meningkatnya pelayanan kelembagaan.

Untuk Urusan ini dapat dilihat dari jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif dan tingkat partisipasi masyarakat. Pada tahun 2012, semua LPMK yang ada di 13 Kelurahan sudah berperan aktif dalam berbagai aktifitas masyarakat, seperti proses perencanaan, pembangunan, dan pembinaan lembaga-lembaga sosial yang ada di Kelurahan.

Realisasi capaian target indikator program tahun 2012 adalah:

1. Rasio swadaya masyarakat terhadap stimulan pemerintah sebesar 44,8%.
2. Jumlah koperasi jasa keuangan syariah (KJKS)
3. Persentase pemberi zakat (Muzzaki)
4. Persentase penerima zakat (Mustahik)
5. Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal dari BUMN/BUMD sebesar 69%
6. Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat sebesar 16%

Untuk indikator Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Muzzaki, Mustahik dan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang mendapat pinjaman modal BUMN/BUMD belum dapat dilihat capaiannya dikarenakan masih belum diperolehnya data realisasi pada tahun 2012.

23. Statistik

Urusan statistik daerah di Kota Solok, dilaksanakan oleh SKPD Bappeda dan BKBPM dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dan akurasi data.

Penyelenggaraan urusan statistik, telah menghasilkan publikasi Buku Kota Solok Dalam Angka dan Penyusunan PDRB Kota Solok, Profil Daerah dan Data Profil Kelurahan se-Kota Solok, serta dukungan data/ informasi dalam bentuk database untuk dukungan pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) online yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri RI, dan penyediaan data/ informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui website bappeda-solokkota.go.id.

24. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan sudah mulai menuju penerapan arsip secara baku. Program yang relevan untuk dilaksanakan setiap tahun adalah bimbingan teknis bagi SKPD dalam pengelolaan kearsipan, karena hal ini sangat penting untuk menjalankan tertib administrasi dan perekaman perjalanan pemerintahan kedepan. Pada urusan ini, dari 44 SKPD yang ada, 33 SKPD telah mengelola arsip secara baku dengan jumlah tenaga kearsipan yang telah dilatih adalah 428 orang.

25. Komunikasi dan Informasi

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan pengetahuan dan perekonomian masyarakat, sehingga kebutuhan terhadap teknologi informasi dan komunikasi ditengah masyarakat akan semakin meningkat.

Kemajuan teknologi informasi juga berdampak terhadap perilaku negatif generasi muda, karena teknologi informasi dan komunikasi dapat merusak terhadap norma-norma yang ada. Untuk itu kedepan Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk meminimalkan efek negatif tersebut serta penataan prasarana berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada urusan komunikasi dan informasi telah dilaksanakan perekaman data KTP Elektronik (E – KTP) yang bertujuan untuk pengeluaran KTP baru atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Solok meraih penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilan Kota Solok dalam menerapkan dan mensosialisasikan elektronik KTP yang melebihi kuota yang telah ditetapkan untuk Kota Solok yaitu sebesar 35.000 kuota, sementara saat ini kuota Kota Solok telah melebihi 35.200 kuota yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tahun 2012 ini juga pemerintah kota Solok menerima penghargaan ICT Pura yaitu penghargaan untuk kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemajuan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat baik ditingkat nasional yaitu kota yang sudah hampir siap untuk menghadapi era ekonomi global. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), pada Badan Kepegawaian Daerah telah dilaksanakan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Aplikasi Data Base Kepegawaian dan pada Dinas Kesehatan telah dilaksanakan Sistem Informasi Kesehatan.

26. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, terutama melalui pengembangan minat baca. Tingginya kebutuhan terhadap informasi, maka akses ke perpustakaan semakin meningkat.

Berkaitan dengan aksesibilitas, perpustakaan telah dilengkapi dengan mobil perpustakaan keliling sejak tahun 2006. Perpustakaan keliling telah bisa melayani masyarakat kota di beberapa lokasi yang setiap tahun jangkauan pelayanannya terus ditingkatkan.

**Tabel 2.34 Statistik Pengunjung Perpustakaan KADP
Tahun 2011-2012**

No	Pengunjung	2011	2012
1.	SD	942	874
2.	SLTP	533	450
3.	SLTA	1.376	2.439
4.	Mahasiswa	4.310	5.284
5.	Pegawai	1.028	726
6.	Dosen/Guru	354	325
7.	TNI/POLRI	26	85
8.	UMUM	646	573
JUMLAH		9.215	10.756

Sumber: Kantor Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan Kota Solok

Dari tabel 2.34 diatas dapat dilihat terjadi peningkatan pengunjung perpustakaan pada tahun 2012 sebesar 16,722% bila dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan karena Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan telah menempati gedung baru semenjak tahun 2011.

Tabel 2.35 Pos Layanan Perpustakaan Keliling Tahun 2012

No	Pos Layanan	No	Pos Layanan
1.	Komplek Pandan Puti	24.	SDN 12 Tanah Garam
2.	Kelurahan KTK	25.	SDN 20 Sinapa Piliang
3.	Rumah Singgah III	26.	SMKN 1
4.	UISB	27.	SDN 04 IX Korong
5.	Kantor Lurah Nan Balimo	28.	SDN 07 KTK
6.	Kantor Lurah Koto Panjang	29.	SDN 14 KTK
7.	AMIK Kosgoro	30.	SMPN 5
8.	Kantor Lurah Sinapa Piliang	31.	SMKN 2
9.	Rumah Singgah IV	32.	SMAN 1
10.	Rumah Singgah V	33.	SMAN 3
11.	Rumah Singgah I	34.	SDN 10 VI Suku
12.	Kantor Lurah Aro IV Korong	35.	SD IT
13.	Rumah Singgah II	36.	Akper YPTK
14.	Panti Asuhan	37.	SDN 17 Kampung Jawa
15.	UMMY	38.	SDN 17 Laing
16.	TBM Ambun Suri	39.	SMAN 4
17.	Lembaga Permayarakatan	40.	SMPN 4
18.	Kelurahan Laing	41.	Akper Depkes
19.	Mesjid Al-Amin	42.	SD Muhammadiyah
20.	Taman Bacaan IX Korong	43.	MTs Muhammadiyah
21.	Panti Asuhan	44.	SMPN 2
22.	MTsN Solok	45.	SMPN 3
23.	SDN 01 Tanah Garam	46.	SMAN 2

Sumber: Kantor Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan Kota Solok

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Pertanian masih menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian Kota Solok. Selain kontribusinya yang masih dominan terhadap PDRB, sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja sehingga akselerasi pembangunan sektor pertanian akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Indikasi ini didukung kenyataan bahwa sektor pertanian masih bersifat padat karya (labor intensive) dibandingkan sektor industri yang bersifat padat modal (capital intensive). Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja pada tahun 2011 sebesar 16,45%.

Kontribusi sektor pertanian ini terhadap PDRB memperlihatkan penurunan setiap tahun yang diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor jasa-jasa dan industri. Hal ini sejalan dengan pergeseran perekonomian yang semakin mengarah ke sektor sekunder dan tersier. Secara luas, tidak berarti bahwa kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terus mengecil, karena yang dicatat dalam sektor pertanian adalah aspek produksi primernya saja (produknya saja), sehingga pengolahan/industri hasil pertanian yang semakin meningkat nilainya tercatat dalam sektor industri. Untuk lebih jelasnya perkembangan produktivitas tanaman padi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.36 Produktivitas Tanaman Padi Tahun 2011-2012

No	Uraian	2011	2012
1	Luas panen (ha)	2.394	2.291
2	Produksi (ton)	17.237	15.578,8
3	Rata-rata produksi (ton/Ha GKG)	7,2	6,8

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok

Bila dilihat dari perkembangan produksi terlihat mengalami penurunan dan sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di Kota Solok. Dari luas tersebut, 1.234 ha merupakan lahan sawah potensial, sedangkan sisanya seluas 3.171 ha berupa lahan nonsawah (lahan kering). Pada tahun 2011 produksi padi di Kota Solok sebesar 17.237 ton dengan luas tanam 2.394 ha.

Usaha perkebunan di Kota Solok merupakan usaha perkebunan rakyat dengan lahan terbatas dan hanya dijadikan sebagai usaha penunjang kehidupan keluarga. Jenis hasil perkebunan rakyat yang ada di Kota Solok berupa kopi, kelapa, cengkeh, jahe, kunyit dan kakao dan lainnya.

Dari beberapa jenis hasil perkebunan rakyat yang ada, kunyit memperlihatkan produktivitas yang tinggi dengan 163 Ha luas tanam dapat menghasilkan sebanyak 4890 ton kunyit pada tahun 2012.

Pembangunan peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Hal ini memberi peluang yang besar untuk mengembangkan berbagai jenis ternak sendiri. Disamping itu, dalam prespektif ekonomi makro, peternakan merupakan sumber pangan yang berkualitas, misalnya daging ataupun susu merupakan bahan baku industri pengolahan pangan, sehingga dari semua kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian dan peternakan dapat menciptakan lapangan kerja. Untuk populasi ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.37 Populasi Ternak Tahun 2011-2012

No	Uraian	2011	2012
1	Sapi	1.820	2.012
2	Kambing	2.228	2.003
3	Kuda	102	157
4	Kerbau	37	36

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok

2. Kehutanan

Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan. Kota Solok merupakan daerah yang mempunyai hutan cukup luas, dimana hampir 25% dari wilayah Kota Solok yaitu seluas 1.358,83 ha, yang terdiri dari 343,96 berupa hutan lindung, 772,15 kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan sisanya merupakan kawasan lindung lainnya berupa lahan kritis dan semi kritis yang ada yang diharapkan dapat dijadikan lahan produktif.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Solok, lebih banyak mendorong pemanfaatan energi dan sumber daya mineral secara efisien. Disamping itu juga memberikan alternatif-alternatif yang dapat mengurangi penggunaan sumber energi tak terbarukan ke sumber energi terbarukan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang energi dan sumber daya mineral di Kota Solok, pada tahun 2012 telah ada 17 pangkalan minyak tanah, 4 SPBU dan 5 buah Agen gas. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.38 Data Pangkalan Minyak Tanah di Kota Solok

No	Nama Pangkalan	Nama Agen	Jumlah Kontrak/bulan (liter)
1`	Nurfidahayati	PT. Darussalam	65.000
2	Edo kurniawan	PT. Darussalam	10.000
3	Murtaliza Juaita	PT. Darussalam	20.000
4	Billi Halberto	PT. Darussalam	10.000
5	Dewi Anggraini	PT. Darussalam	5.000
6	Afifah Maharani	UD. Batang Lembang	20.000
7	Ronni	UD. Batang Lembang	10.000
8	Gusmiati	UD. Batang Lembang	15.000
9	Aria delfiani	UD. Batang Lembang	10.000
10	Anggun Sari	UD. Batang Lembang	20.000
11	Sri Wulan	UD. Batang Lembang	10.000
12	Nursiam	UD. Batang Lembang	20.000
13	Musnaini	PT. Sumber Guna Alam	20.000
14	Afrianse	CV. Lokomotif	10.000
15	Tamsil	CV. Lokomotif	10.000
16	Baskir	CV. Lokomotif	15.000
17	Nofri Noza	CV. Lokomotif	5.000
	Total minyak tanah/bulan		275.000

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Tabel 2.39 Data SPBU di Kota Solok

No	Nama SPBU	Nama Pemilik	Alamat
1	SPBU PT. Sinar Jaya Murni	Syamsurizal	Jln. Kihajar Dewantara Kel. VI Suku
2	SPBU PT. Solok Abadi	H. William	Jln. By. Pass Kel. KTK
3	SPBU PT. Pamulindo Mas	Yazerdion Yatim	Jln. Tuanku Imam Bonjol No. 100 Kel. Tanah Garam
4	SPBU Hj. Des Efiarmy Alfariza	Hj Des Efiarmy Alfariza	Jln. Pandan Ujung Kel. PPA

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Tabel 2.40 Data Agen Gas di Kota Solok

No	Nama Agen Gas	Nama Pemilik	Penjualan / bulan
1	CV. Balain Raso	Efi Alfiani	1200 tabung/ bulan
2	PT. Tiara Sejahtera Mandiri	Edison	5000 tabung/ bulan
3	PT. Hermes Indo Gas	Yon Satria Putra, SH	5000 tabung/ bulan
4	CV. Ananda	Albanil Aziz	300 tabung/ bulan
5	CV. Lucky	Yusrizal	450 tabung/ bulan

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Program yang harus dilaksanakan kedepan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang lebih efektif dan efisien.

4. Pariwisata

Perkembangan pariwisata pada tahun 2012 masih belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Minimnya fasilitas dan prasarana wisata yang ada sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di Kota Solok. Pada tahun 2012, kegiatan bidang pariwisata lebih difokuskan kepada pemeliharaan prasarana dan sarana objek wisata yang ada dan penyelenggaraan Rentak Kemilau Nusantara yang diadakan bertepatan dengan HUT Kota Solok.

Untuk menunjang pariwisata, saat ini di Kota Solok terdapat 3 buah hotel kelas Melati 3 dan 2 wisma. Berikut data perkembangan angka kunjungan wisata di Kota Solok 2010-2012:

Tabel 2.41 Angka Kunjungan Wisata di Kota Solok Tahun 2011-2012

No	Uraian	2011	2012
1	Jumlah kunjungan wisata	15.215 orang	16.915 orang
2	Pertumbuhan kunjungan wisata	11,2%	11,7%
3	Tingkat hunian hotel		17.165

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa walaupun dalam segi jumlah masih kecil, namun jika dilihat dari pertumbuhannya per tahun memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,2% untuk angka kunjungan wisata dan 29% untuk tingkat hunian hotel melalui peningkatan pengelolaan objek wisata dan manajemen perhotelan akan dapat meningkatkan share sektor pariwisata dalam menunjang perekonomian Kota Solok.

5. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan perikanan di Kota Solok melalui beberapa kegiatan, antara lain Pendampingan pada petani pembudidaya ikan. Disamping itu untuk mendukung pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), dilakukan kerja sama dengan petani dalam kegiatan pendederan benih ikan.

Jenis budidaya ikan di Kota Solok terdapat tiga jenis yaitu : budidaya ikan kolam, ikan sawah dan ikan keramba. Pada tahun 2012, budidaya ikan terbanyak adalah budidaya ikankolam jenis ikan mas, nila dan lele.

Sedangkan untuk produksi ikan di Kota Solok mengalami kenaikan dari 70,13 ton di tahun 2011 menjadi 81,81 ton di tahun 2012, dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.42 Jumlah Produksi ikan Tahun 2011-2012

No	Uraian	2011	2012
1	Ikan Budidaya	59,70 ton	69,86 ton
2	Perikanan tangkap	10,43 ton	11,95 ton
Jumlah		70,13 ton	81,81 ton

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok

6. Perdagangan

Sampai akhir tahun 2012, jumlah pedagang yang ada di Kota Solok berjumlah 3.760 pedagang yang tersebar di Pasar Raya dan Luar Pasar Raya Solok. Hampir 72% pedagang yang ada di Kota Solok berada di Kawasan Pasar Raya Solok. Mengingat jumlah pedagang yang meningkat setiap tahunnya dan kawasan Pasar yang sudah jenuh, diperlukan penambahan kawasan pusat perdagangan baru.

Berdasarkan TDP yang diterbitkan pada tahun 2012, 61.48% merupakan perusahaan perorangan yang jumlahnya mencapai 158 unit pada tahun 2012. Jika dilihat dibandingkan tahun 2011, terjadi penurunan jumlah TDP yang diterbitkan.

**Tabel 2.43 Jumlah dan Bentuk Badan Usaha
Berdasarkan TDP yang diterbitkan Tahun 2011-2012**

Bentuk Perusahaan	JUMLAH	
	2011	2012
PT	16	8
CV	81	90
Firma	-	-
Perusahaan Perorangan	164	158
Koperasi	3	1
Jumlah	264	257

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Jika dilihat dari kondisi prasarana perdagangan, kondisi pasar yang ada sekarang sangat tidak nyaman untuk konsumen, sementara pasar yang ada melayani pedagang dan konsumen kota dan daerah hinterlandnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah pedagang dan konsumen yang tidak sesuai lagi dengan space yang ada di Pasar Raya Solok.

7. Industri

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri di Kota Solok saat ini adalah masih rendahnya daya saing industri di pasaran. Walaupun memiliki peningkatan dalam jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja namun kenaikannya belum signifikan.

Kota Solok sangat berpeluang untuk mengembangkan industri kecil dan menengah mengingat banyaknya sumber bahan baku yang ada di daerah sekitar. Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok 2011-2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44 Perkembangan IKM di Kota Solok 2011-2012

No.	Kelompok Industri	Tahun	
		2011	2012
1	Industri Pangan		
	a. Unit Usaha	151	154
	b. Tenaga Kerja	644	652
2	Industri Sandang		
	a. Unit Usaha	36	37
	b. Tenaga Kerja	174	176
3	Industri Kimia dan Bahan bangunan		
	a. Unit Usaha	80	86
	b. Tenaga kerja	382	395
4	Industri mesin, logam dan elektronika		
	a. Unit Usaha	33	34
	b. Tenaga Kerja	123	125
5	Industri Kerajinan		
	a. Unit Usaha	90	91
	b. Tenaga Kerja	390	394
	Jumlah		
	Unit Usaha	390	402
	Tenaga Kerja	1.713	1.742

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa industri di Kota Solok pada tahun 2012 jika dilihat dari unit usaha mengalami pertumbuhan sebesar 2,92% dan dari sisi penyerapan tenaga kerja terjadi pertumbuhan sebesar 1,66% yang didominasi oleh industri pangan, khususnya industri makanan ringan. Namun jika dilihat walaupun cukup banyak industri makanan dan industri lain di Kota Solok sampai saat ini belum ada produk yang menonjol yang dapat dijadikan sebagai icon Kota Solok. Sistem manajemen usaha dan proses produksi dan packaging masih sangat diperlukan untuk difasilitasi.

2.1.4 Aspek Daya Saing daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Sebagai Negara yang melaksanakan konsep ekonomi terbuka (Open Economy), aktivitas ekonomi di Indonesia memberi peran yang cukup besar terhadap aktivitas Negara lain ataupun sebaliknya, dan hal ini juga memberi imbas terhadap aktivitas ekonomi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Semakin besar kontribusi dari aktivitas ekonomi suatu Negara terhadap Negara lain juga berdampak terhadap pergerakan aktivitas daerah – daerah dalam Negara tersebut dimana akan terlihat tingkat keterbukaan perekonomian daerah tersebut semakin besar dan kekuatan pasar bekerja semakin bebas (No Barriers To Entry).

Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Solok, dalam aktivitas perekonomian yang terjadi di Kota Solok, batas wilayah administrasi tidak lagi menjadi halangan terjadinya aktivitas ekonomi, dan sebagai suatu kota, maka struktur mata pencaharian masyarakat Kota Solok terbanyak pada sektor perdagangan yaitu: 29,27% diikuti oleh sektor jasa-jasa 29,10%, pertanian 16,42% dan transportasi/komunikasi 9,12%. Namun potensi sektor pertanian masih termasuk sebagai penyedia lapangan kerja dan kesempatan kerja yang besar di Kota Solok. Sektor pertanian juga merupakan penyedia kebutuhan dasar, dan sektor pertanian merupakan salah satu faktor paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di kelurahan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Walaupun Sektor Pertanian menyediakan lapangan usaha yang cukup besar, tetapi bila dilihat dari persentase Distribusi PDRB Kota Solok atas dasar harga berlaku hanya memberikan sumbangan persentase distribusi sebesar 8% s/d 9 %, dan yang terbesar disumbangkan oleh sektor jasa-jasa yang berada pada Kisaran 23% s/d 24%.

Sebagai daerah perlintasan yang cukup ramai dengan jarak antara Kota dan Kabupaten serta Ibu Kota Provinsi yang cukup dekat dan ditambah dengan pengaruh daerah hinterland Kota Solok yang masih menganggap Kota Solok sebagai tujuan akhir maupun antara dari aktivitas ekonominya, maka rata – rata pertumbuhan dan prediksi pertumbuhan ekonomi Kota Solok 2007 s/d 2014 berkisar pada angka 6% s/d 7%. Namun pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak serta merta membawa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk itu kemampuan ekonomi dapat dilihat produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kota Solok.

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Dari 9 sektor/lapangan usaha, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB di Kota Solok adalah sektor/lapangan usaha jasa-jasa (23,75%), disusul oleh pengangkutan & komunikasi (21,70%), bangunan (15,47%), perdagangan hotel dan restoran (10,76%) pertanian (8,61%), industri pengolahan (8,75%), keuangan & persewaan & jasa perusahaan (7,77%), listrik, gas & air minum (2,75%) serta kontribusi terkecil terhadap PDRB adalah lapangan usaha pertambangan/penggalan(0,61%).

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Penyediaan fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan salah satu aspek yang menentukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Dengan tersedianya fasilitas atau infrastruktur yang memadai, akan dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang antar daerah dan antar kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan dan jembatan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas perdagangan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota, serta dapat meningkatkan daya saing terhadap daerah lainnya.

a. Aksesibilitas Daerah

Kota Solok secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan yang mampu mengakses daerah sekitarnya melalui penyediaan prasarana dan sarana serta berbagai fasilitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Kota Solok tidak hanya strategis karena dikelilingi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Solok, tetapi menjadi lebih strategis lagi karena terletak di jalur jalan arah utara menuju Kota Bukittinggi dan Medan, arah barat menuju Ibukota Propinsi Sumatera Barat (Padang) dan arah timur menuju Jambi, Palembang, Bengkulu dan Pulau Jawa. Dengan demikian, Kota Solok merupakan penopang jalur distribusi bagi perekonomian Propinsi Sumatera Barat.

Dengan letak kota yang strategis tersebut, maka dengan sendirinya Kota Solok akan sangat mudah di akses dari berbagai pintu masuk yang ada. Karena itu, ketersediaan infrastruktur, khususnya jalan akan menjadi sangat penting dalam rangka peningkatan akses dimaksud. Dalam mendukung aksesibilitas tersebut, Kota Solok memiliki panjang jalan yang semakin meningkat dalam 7 tahun terakhir ini yaitu 176,33 km tahun 2005 menjadi 200,55 km pada tahun 2011. Namun demikian, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun terlihat semakin menurun, artinya bahwa laju penambahan panjang jalan masih lebih rendah dibanding dengan laju pertumbuhan jumlah kendaraan. Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik. Daya saing lainnya di bidang prasarana dan sarana perhubungan adalah dimilikinya sebuah terminal bus regional.

Tabel 2.45 Aksesibilitas Daerah Tahun 2012

No	Uraian	Jumlah/Rasio Tahun 2011	Jumlah/Rasio Tahun 2012
1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah kendaraan	1 : 77,45	1 : 94,02
	- Panjang Jalan	200,55 km	200,55 km
	- Jumlah Kendaraan	15.532 unit	18.855 unit

Sumber : Data Diolah dari berbagai Sumber

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2011 sebesar 1 : 77,45 dan tahun 2012 sebesar 1 : 94,02. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2011, setiap 1 km jalan terdapat 77,45 unit kendaraan dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah kendaraan dimana setiap 1 km jalan terdapat 94,02 unit kendaraan.

b. Penataan Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031, Struktur Ruang Kota Solok terdiri dari Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Kota, yaitu : Kawasan Pusat Kota Solok yang berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, sebahagian Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Koto Panjang, dengan skala pelayanan regional dan kota;
2. Sub Pusat Pelayanan Kota, terdiri dari :
 - a. Kawasan Tanah Garam yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam dengan skala pelayanan regional dan kota.
 - b. Kawasan Simpang Rumbio yang berlokasi di Kelurahan Simpang Rumbio dengan skala pelayanan regional dan kota
 - c. Kawasan Laing yang berlokasi di Kelurahan Laing dengan skala pelayanan regional dan kota.
3. Pusat Lingkungan, terdiri dari 6 (enam) yang masing-masing berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Tanjung Paku, Aro IV Korong, IX Korong, KTK dan VI Suku.

Secara lebih jelas mengenai rencana pusat-pusat pelayanan di Kota Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.46 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Solok

No.	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Pengembangan	Wilayah Cakupan	Skala Pelayanan
A. Pusat Pelayanan Kota					
1.	Kawasan Pasar Pandan Air Mati	Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pertokoan Modern • Bank, Perkantoran Swasta dan Jasa Lain; • Perumahan Kepadatan Tinggi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Wilayah Kota 	Regional dan Kota
B. Sub Pusat Pelayanan Kota					

No.	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Pengembangan	Wilayah Cakupan	Skala Pelayanan
1.	Kawasan Laing	Perkantoran Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Tinggi • Pariwisata • Pertanian • Perumahan Kepadatan Rendah hingga Sedang • Perdagangan dan Jasa • Transportasi • Prasarana Olah Raga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kel. Laing • Kel. Nan Balimo • Kel. Tanjung Paku • Kel. Kampung Jawa 	Regional dan Kota
2.	Kawasan Simpang Rumbio	Transportasi Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi Regional • Perdagangan dan Jasa • Perkantoran swasta • Kesehatan • Perumahan Kepadatan Sedang dan Tinggi • Pertanian • Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kel. Simpang Rumbio • Kel. Aro IV Korong • Kel. KTK 	Regional dan Kota
3.	Kawasan Tanah Garam	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perumahan Kepadatan Rendah • Perdagangan dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kel. Tanah Garam • Kel. VI Suku • Kel. Sinapa Piliang • Kel. IX Korong 	Kota
C. Pusat Lingkungan					
1.	Kampung Jawa	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana sosial dan ekonomi • Toko dan Jasa Lain 		Lingkungan

No.	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Pengembangan	Wilayah Cakupan	Skala Pelayanan
2.	Tanjung Paku	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana sosial dan ekonomi • Toko dan Jasa Lain 		Lingkungan
3.	Aro IV Korong	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana sosial dan ekonomi • Toko dan Jasa Lain 		Lingkungan
4.	IX Korong	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana sosial dan ekonomi • Toko dan Jasa Lain 		Lingkungan
5.	Kampai Tabu Karambia	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana sosial dan ekonomi • Toko dan Jasa Lain 		Lingkungan
6.	VI Suku	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana sosial dan ekonomi • Warung dan Jasa Lain 		Lingkungan

Sumber : RTRW Kota Solok Tahun 2012-2031

Karena itu, dalam penyusunan perencanaan tata ruang, arahan peruntukan lahan perlu mempertimbangkan daya tarik daerah bagi investor dan kemudahan aksesibilitas bagi pelaku ekonomi, sehingga daya saing daerah dapat ditingkatkan.

c. Ketersediaan Air Bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Solok pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan sudah meliputi seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok. Sistem jaringan perpipaan di Kota Solok saat ini, pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan pada tahun 2012 sudah mencapai 94,60% dari jumlah penduduk. Namun kedepan, pelayanan untuk air bersih ini masih perlu ditingkatkan, karena bila dilihat secara kuantitas, air yang sampai ke pelanggan masih belum mencukupi kebutuhan serta secara kontinuitas pelayanan air bersih oleh PDAM ini belum dapat dilakukan secara merata selama 24 jam per hari kepada pelanggan. Karena itu, melalui pembangunan jaringan distribusi dari sumber air baku baru yakni dari Guguak Rantau Kabupaten Solok dapat diselesaikan pelayanan penyediaan air bersih ini akan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Dengan semakin baiknya tingkat layanan/ketersediaan air bersih ini, maka diharapkan Kota Solok semakin diminati oleh calon investor untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Tabel 2.47 Kapasitas Terpasang dan Produksi Air Bersih PDAM Kota Solok Tahun 2012

No	Sumber	Kapasitas (liter/detik)		Jam Operasional	Sistim Transmisi dan Distribusi
		Terpasang	Operasi		
1	MA. Pincuran Gadang	20	8,23	24	Gravitasi
2	MA. Tabek Puyuh	40	23,44	24	Gravitasi
3	Air Tabit	20	19,79	24	Gravitasi
4	IPA. KTK	60	47,20	24	Pompa
5	Guntung	40	34,22	24	Gravitasi
Total		180	132,88	-	-

Sumber : PDAM Kota Solok Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa total produksi air bersih dari 5 sumber air baku yang ada saat ini baru sebesar 132,88 liter/detik. Bila dilihat kebutuhan air bersih tahun 2012 berdasarkan hasil perhitungan di dalam revisi master plan Air Minum yakni sebesar 340,74 liter/detik, terlihat Kota Solok saat ini masih kekurangan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebesar 207,86 liter/detik.

d. Fasilitas Listrik dan Telepon

Tersedianya tenaga listrik secara memadai akan menunjang percepatan pembangunan, selanjutnya dengan adanya tenaga listrik diharapkan akan mendorong tumbuhnya suasana kondusif bagi berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Kapasitas daya listrik yang disediakan oleh PLN Cabang Kota Solok adalah sebesar 8.277 KVa. Pada Tahun 2011, terdapat sebanyak 14.204 pelanggan listrik yang dialiri oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Kota Solok, dengan persentase daya terpasang kapasitas R1 450 Va sebesar 93,50%, daya terpasang R1 450-900 Va sebesar 5,50%, daya terpasang R1 900-1.300 Va, 1.300-2.200 Va, 2.200-4.500 Va sebesar 1,00%. Pengguna listrik tersebut terbagi ke dalam kelompok konsumsi rumah tangga sebesar 81,81%, perdagangan 14,80%, sosial 1,95%. Selengkapnya mengenai pengguna listrik di Kota Solok dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut ini :

Tabel 2.48 Pengguna Listrik Di Kota Solok Tahun 2012

No	Tipe Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Persentase
1	Rumah tangga (R)	11.461	81,78
2	Perdagangan (B)	2.079	14,83
3	Sosial	273	1,95
4	Instansi umum (P1)	131	0,93
5	Industri (I)	3	0,02
6	Lampu jalan (P3)	67	0,48
Jumlah		14.014	100,00

Sumber : PT PLN (Persero) Cabang Solok

Jika dirasiokan dengan jumlah kapasitas daya listrik PLN Kota Solok dengan jumlah persentase pelanggan berdasarkan daya (Watt /Va), maka kapasitas daya listrik PLN Kota Solok masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Solok.

1. Jumlah total daya listrik berdasarkan PLN Cabang Kota Solok adalah sebesar 8.277 KVa atau setara dengan 8.277.000 watt /Va;
2. Jumlah total pelanggan sebanyak 14.204, dibagi berdasarkan persentase daya :
 - a. R1 450 Va sebesar 93,50% sama dengan 13.281 pelanggan dengan pemakaian daya sebesar 5.976.333 Va;
 - b. R1 450-900 Va sebesar 5,50% sama dengan 781 pelanggan dengan pemakaian daya sebesar 703.098 Va;
 - c. R1 900-1.300 Va, 1.300-2.200 Va, 2.200-4.500 Va sebesar 1,00% sama dengan 142 pelanggan dengan pemakaian daya sebesar 639.180 Va.

Jumlah total pemakaian daya (7.318.611 Va) dirasiokan dengan jumlah total kapasitas daya listrik PLN cabang Kota Solok, maka PLN cabang Kota Solok masih memiliki cadangan kapasitas daya sebesar 908.389 Va.

Sarana telekomunikasi berupa telepon masih menjadi salah satu sarana telekomunikasi yang paling diminati. Berdasarkan data PT.Telkom Cabang Solok jumlah pelanggan telepon di Kota Solok sebanyak 13.699 pengguna, yang terdiri atas beberapa jenis pengguna. Hingga Tahun 2012 belum semua masyarakat Kota Solok yang menggunakan jaringan telepon rumah. Hal ini dipengaruhi dengan adanya telepon seluler. Selengkapnya mengenai jumlah pengguna sarana telekomunikasi telepon di Kota Solok dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 2.49 Jumlah Pengguna Sarana Telekomunikasi Telepon di Kota Solok Tahun 2012

No	Pelanggan	Jumlah
1	Kantor /sekolah /rumah	12.216
2	Bisnis /hotel /toko	1.267
3	Umum /wartel	-
4	Flexi	216
Total		13.699

Sumber : PT Telkom Indonesia Cabang Solok

e. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Tersedianya fasilitas perdagangan dan jasa merupakan indikator capaian kinerja dalam peningkatan daya saing daerah di bidang perdagangan dan jasa. Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan, peningkatan jumlah kamar hotel serta peningkatan jumlah restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah satu pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota Solok hingga Tahun 2011 adalah sebanyak 1.584 unit, yang masing-masing tersebar di Kecamatan Lubuk Sikarah sebanyak 380 unit dan di Kecamatan Tanjung Harapan sebanyak 1.204 unit. Sarana perdagangan paling banyak didominasi oleh jenis

pertokoan/mini market yaitu sebanyak 817 unit dan yang paling sedikit adalah pasar tradisional yaitu berjumlah 2 (dua) unit. Sedangkan jasa perbankan sampai saat sekarang tercatat sebanyak 9 (sembilan) unit.. Selengkapnya mengenai jumlah, jenis dan sebaran sarana perdagangan dan jasa di Kota Solok dapat dilihat pada Tabel 2.50 di bawah ini:

Tabel2.50 Jumlah Sarana Perdagangan dan Jasa di Kota Solok Tahun 2012

No	Nama Kecamatan	Sarana Perdagangan dan Jasa (unit)					
		Pasar Tradisional	Toko /Pertokoan	Kios /Warung	UD	Koperasi	Bank
I	Lubuk Sikarah	1	11	175	171	22	0
1	Aro IV Korong	1	4	69	31	1	-
2	IX Korong	0	0	7	4	0	-
3	Kampai Tabu Karambil	0	3	9	60	2	-
4	Simpang Rumbio	0	2	0	16	6	-
5	Sinapa Piliang	0	0	9	0	5	-
6	Tanah Garam	0	1	67	56	1	-
7	VI Suku	0	1	14	4	7	-
II	Tanjung Harapan	1	806	207	167	12	9
1	Kampung Jawa	0	2	15	0	3	-
2	Koto Panjang	1	0	3	17	1	2
3	Laing	0	4	1	0	1	-
4	Nan Balimo	0	0	40	8	5	-
5	Pasar Pandan Air Mati	0	799	147	85	1	4
6	Tanjung Paku	0	1	1	57	1	3
Total		2	817	382	338	34	9

Sumber : Dinas Koperindag Kota Solok

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, serta berbagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perizinan, dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

Di samping itu daya tarik investasi juga di tentukan oleh lokasi Investasi dan juga keterbukaan masyarakat sekitar akan datangnya investor baru yang akan ber invest di daerah tersebut.

1. Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2012 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan dan unjuk rasa yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

2. Kemudahan Perizinan

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan tata cara perolehan izin atau pengurusan izin untuk berinvestasi. Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu (*one stop service*), melalui Kantor Pelayanan Perizinan Kota Solok. Kepastian prosedur, waktu dan biaya perizinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi.

Ada 51 jenis perizinan yang dilayani secara transparan di Kota Solok, baik dari segi persyaratan, biaya pengurusan maupun lama/waktu pengurusan. Semua ini terangkum dalam Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45/393/KPTS/WSL-2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pedoman Pelayanan dan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

3. Pajak dan Restribusi Daerah

Pajak dan restribusi daerah merupakan salah satu pos penerimaan yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai gambaran, persentase sumbangan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap APBD Kota Solok Tahun 2010: 1,69% dan Tahun 2011: 1,94%. Penetapan tarif pajak dan restribusi daerah ini, harus dilakukan secara hati-hati, sehingga kebijakan ini tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi sehingga calon investor menjadi kurang minatnya untuk menanamkan modal di Kota Solok.

4. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha.

Perda merupakan instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun desinsentif sebuah kebijakan daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi : perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, perda terkait dengan ketenagakerjaan

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM ini sangat berkaitan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Rasio penduduk Kota Solok tahun 2012 yang dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.51 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Solok

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Lulusan S1	3.905	3.924
2	Jumlah Lulusan S2	143	228
3	Jumlah Lulusan S3	7	11
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	4.055	4.163
5	Jumlah Penduduk	67.134	67.336
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,06	0.06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 2.52 Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2012
Kota Solok**

No.	Uraian	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	19.027	18.927
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	2.334	3.342
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	21.361	22.260
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	39.360	38.884
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	0,54	0,57

Sumber: BPS Kota Solok

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Tabel 2.53 Pencapaian RPJMD Urusan Pendidikan Tahun 2011-2012

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Persentase guru MDA/TPA yang bersertifikasi	43	86	50	100
	- Persentase siswa SLTP dan SLTA yang mengikuti kegiatan mabit	80	75	85	65
	- Persentase jemaah mesjid	18	20	28	20
	- Jumlah lembaga agama yang dibina	4	4	4	4
	- Persentase kegiatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	100	100	100	100
	- % rumah ibadah yang dibantu				
	- Mesjid	50	100	50	100
	- Mushalla	40	80	45	100
	- Persentase MDA yang melaksanakan didikan subuh	60	100	65	100
2	- Persentase pendirian <i>boarding school</i>	0	5	5	5
	- Jumlah sekolah yang melaksanakan RSBI				
	1) SD	0	0	2,5	0,23
	2) SMP	15	0,16	15	0,16
	3) SMA	50	30	50	30
	- Rasio Sekolah per siswa				
	1) SD/MI	191	195	191	196
	2)SLTP	563	530	563	601
	3)SLTA	500	542	500	559
	- Rasio siswa per ruang kelas				
	1)SD/MI	26	27	26	26
	2)SLTP	32	30	32	30
	3)SLTA	32	35	32	30
	4)SMK	36		36	
	- Angka Rata-rata lama sekolah				
3	1. SD	6,04	6,05	6,03	6,05
	2. SMP	3,04	3,05	3,03	3,05
	3. SLTA/MA	3,04	3,05	3,03	3,05
	- Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	1) SD/MI/SDLB/Paket A	120	118,61	122	119,56
	2) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	107	114,11	110	129,56
	3) SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	133	173,67	134	180,1
	- Angka Partisipasi Murni (APM)				
	1) SD/MI/SDLB/Paket A	96,80	102,06	97	101,32
	2) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	70	76,85	75	88,69
	3) SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	69	119,96	70	116,09

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	- Angka kelulusan UN				
	1) SD/MI	91	94,48	92	100
	2) SLTP/MTs/	117	96,27	118	99,03
	3) SLTA/MA	83	98,93	86	99,75
	- Angka Melek huruf	99,02	99.64	99,03	
	- Persentase kepala sekolah yang mengikuti pelatihan professional Berkelanjutan	30	60	45	60
	- Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/DIV				
	1)SD	45	59,15	50	67,85
	2) SLTP	75	83,72	89,9	88,04
	3) SLTA	94	98.50	96	98,56
	4) SMK		96.81		96,68
	- Sertifikasi Guru (Pemerintah Pusat)				
	1)SD	50	33.96	65	37,9
	2)SLTP		50.89		61,93
	3) SLTA	45	59,79	65	72,47
	- Rasio guru per murid				
	1)SD	1:15	1:15	1:15	1:14
	2) SLTP	1:12	1:12	1:12	1:12
	3) SLTA	1:10	1:10	1:10	1:10

Penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya guna mencapai realisasi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015. Untuk Urusan Pendidikan terdapat 32 indikator kinerja program, dari 32 indikator tersebut 26 indikator atau sekitar 80% telah mencapai bahkan melebihi target, hanya 6 indikator yang tidak mencapai target. Selain peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, juga dilakukan upaya pencapaian standar pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas lulusan. Namun dari hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator RPJMD dapat terlihat masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target, diantaranya pelaksanaan RSBI dan pelaksanaan MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa). Adapun penyebab rendahnya persentase siswa SLTP dan SLTA yang mengikuti MABIT adalah banyaknya siswa SLTP dan SLTA yang berasal dari luar Kota Solok sehingga tidak dapat mengikuti Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) yang dilaksanakan pada malam hari. Adapun untuk pelaksanaan sekolah RSBI dan pendirian boarding school masih memerlukan pemikiran lebih lanjut terkait yang akan dicapai pada akhir tahun 2015 yang akan datang.

2. Kesehatan

Tabel 2.54 Pencapaian RPJMD Urusan Kesehatan Tahun 2011-2012

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Persentase ketersediaan obat generik	86	85	89	89
2	- Presentase balita gizi kurang	18,4	8.74	18	6,25
	- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
	- Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100
3	- Cakupan pelayanan kesehatan lansia	72	72,96	72	74,3
4	- Persentase masyarakat yg mempunyai jaminan kesehatan	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	33	46.99	50	56,2
	- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	78	50	78	95
	- Cakupan air minum yang memenuhi syarat kesehatan	85	88.2	90	96,15
	- Akses Jamban sehat	80	84.22	85	89,44
	- Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aides	85	83	88	86,3
5	- persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	68	67	70	70
6	- Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100
	- Cakupan desa UCI	92	100	92	100
	- Cakupan pelayanan anak balita	54	54.6	60	78,08
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100
	- Persentase kunjungan masyarakat ke Puskesmas (kunjungan baru)	1,5	1.23	1,6	1,35
	- Rasio Pustu per satuan penduduk	3.599	3.480	3.709	3,493
	- Rasio Poliklinik per satuan penduduk	20.392	14.790	21.012	14,849
	- Rasio Posyandu per satuan balita	78,9716	77	79,4116	78
7	- Jumlah pusat pelayanan spesifik Traumatic Centre	0	0	0	0
8	- Umur Harapan Hidup	69,49	69,5	69,64	belum ada data dari BPS
	- Cakupan penemuan BTA+	50	44	60	47
	- Penemuan kasus AFP per 1000 penduduk	≥2	1	≥2	1
	- Penderita DBD ditangani	100	100	100	100
	- Penemuan penderita diare	80	80	80	80
	- Penemuan penderita pneumonia balita	60	40	70	42
	- Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 jam	100	tidak ada KLB	100	tidak ada KLB

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
9	- Angka kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	190	160,9	166	250,4
	- Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	25	7,2	24	9,18
	- Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	40	99,7	60	92,36
	- Cakupan kunjungan ibu hamil K4	93	96,3	94	95,51
	- Cakupan kunjungan ibu nifas	75	75,4	80	71,04
	- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80	73,4	80	78,03
	- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	40	15,05	60	39,22
	- Cakupan kunjungan bayi	59	73,8	60	92,07

Penyelenggaraan urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya guna mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015. Dari tabel diatas, dapat kita lihat secara umum realisasi indikator kinerja program pada urusan kesehatan pada tahun 2012 terdapat 26 indikator atau 76% sudah mencapai target dan 9 indikator atau 24% nya belum mencapai target. Walaupun 9 indikator tersebut tidak mencapai target namun untuk realisasinya meningkat setiap tahunnya. Tingginya capaian target ini tentunya terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Hal ini dicapai melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pengetahuan kader dan bertambahnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi serta adanya jaminan kesehatan kepada masyarakat (jamkesmas). Masih rendahnya cakupan kunjungan ibu nifas disebabkan karena masih rendahnya kunjungan petugas kesehatan kepada ibu yang nifas. Sedangkan pada indikator rendahnya cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani dan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani disebabkan karena rendahnya jumlah kasus yang ditemui.

3. Pekerjaan Umum

Pencapaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota, yang dilaksanakan melalui Urusan Pekerjaan Umum periode 2011 - 2012 dapat diukur dengan beberapa indikator utama, antara lain proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, dan sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima, rasio panjang jaringan irigasi yang dapat melayani lahan pertanian dan rasio pembangunan turap di wilayah jalan dan aliran sungai rawan longsor.

Pada urusan pekerjaan umum juga memiliki kewenangan dalam penyediaan fasilitas sosial yang diukur dengan rasio ketersediaan rumah ibadah, dan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk. Sedangkan untuk pembangunan sanitasi kota keberhasilannya dapat dilihat dari indikator utama antara lain perkembangan rasio drainase dalam kondisi baik, rumah tangga berakses air bersih, dan rasio rumah tangga pengguna listrik, serta rasio rumah tangga bersanitasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.55 Pencapaian RPJMD Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Persentase panjang jalan kondisi baik - Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	50 49,5	80,63 49,49	52 49,8	52,86 49,67
2	- Persentase ketersediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	74,62	70,43	76,06	72,54
3	- Rasio drainase dalam kondisi baik	80,00	82,50	82,00	82,00
4	- Persentase ketersediaan air irigasi pertanian rakyat pada sistim irigasi yang sudah ada	71,62	99,64	74,04	74,04
5	- Persentase penduduk berakses air bersih - Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	94,5 93	87,85 88,63	95 94	95 94
6	- Pesentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kota (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	39,5	39,5	41	41
7	- Persentase penanganan tebing sungai yang rawan pengikisan	55	9,73	60	60

Sumber: Dinas PU Kota Solok Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat dimana dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang terealisasi sebesar 99,73% dan persentase ketersediaan jalan menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman yang hanya terealisasi sebesar 95,37% dari target yang ditetapkan serta terdapat 1(satu) indikator kinerja yang melebihi target yaitu persentase panjang jalan kondisi baik dengan capaian sebesar 101,65%. Terkait dengan tidak tercapainya persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan pembangunan trotoar di sepanjang jalan antar simpang sigege sampai jembatan Tanah Garam karena lebar ruas jalan yang ada perlu diperlebar sesuai dengan lebar rencana yang telah ditetapkan rencana detail tata ruang Kota Solok.

4. Perumahan

Pencapaian target untuk urusan perumahan tahun 2011-2012 terdiri dari 3(tiga) sasaran utama dan terbagi dari beberapa indikator kinerja. Adapun rincian yang akan dicapai dalam RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015 untuk urusan perumahan yaitu:

Tabel 2.56 Pencapaian RPJMD Urusan Perumahan Tahun 2011-2012

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program			
			2011		2012	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	- Persentase luas permukiman tertata - Persentase permukiman layak huni	7 63	6 85,5	10 66	7,55 65,27
2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	- Persentase penyediaan TPU	-	-	25	0
3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	- Persentase tenaga BPK dan relawan yang terampil - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran - Persentase ketersediaan sarana pencegahan bahaya kebakaran	30 70 50	20 58 10	40 75 60	55 60 58
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	- Persentase ketersediaan sistim air limbah setempat yang memadai - Persentase ketersediaan sistim air limbah skala komunitas/kawasan kota	55,53 42,23	84.51 28.16	55,88 44,58	55.88 44.58

Sumber: Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok Tahun 2012

Untuk urusan perumahan dari tabel diatas terlihat dimana dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015 hanya terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai target yang ditetapkan yaitu persentase ketersediaan sistim air limbah setempat dan persentase ketersediaan sistim air limbah skala komunitas/kawasan kota yaitu sebesar 100%. Sementara itu terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak ada realisasinya sama sekali yaitu untuk persentase penyediaan tempat pemakaman umum (TPU). Tidak adanya realisasi ini disebabkan tidak tersedianya anggaran kegiatan yang dapat untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan baik melalui APBD Kota Solok sendiri maupun dari sumber dana lainnya.

5. Penataan Ruang

Tabel 2.57 Pencapaian RPJMD Urusan Penataan Ruang 2011-2012

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	40	40	50	50
2	- Rasio bangunan yang memiliki izin - Jumlah regulasi yang disusun	39 3	49,33 3	42 4	53,71 4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015, sampai tahun 2012 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, bahkan untuk rasio bangunan yang memiliki izin dapat terealisasi sebesar 53,27% melebihi target yang ditetapkan sebesar 42%. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan pemanfaatan ruang

6. Perencanaan Pembangunan

Pada urusan perencanaan pembangunan terdapat satu program prioritas yaitu program perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis : terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel. Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat beberapa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015 dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.58 Pencapaian RPJMD
Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2012

No	Indikator kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100	66,67	100	100
2	Tingkat usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	83	96,11	86	72,03
3	Tingkat usulan yang diakomodasi dalam APBD	65	67,14	70	51,69
4	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	70	47	75	63,56

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2012 seluruh dokumen perencanaan telah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011, karena pada tahun 2011 tidak seluruh dokumen perencanaan dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan untuk indikator tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD dan APBD sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang adalah kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan dana stimulan (Goro Badunsanak).

Melalui urusan ini telah dihasilkan dokumen RKPD Tahun 2012, RKT 2012, Penetapan Kinerja 2013, LAKIP 2011, LKPJ dan LPPD 2011 serta laporan realisasi kegiatan belanja langsung APBD Tahun 2012.

7. Perhubungan

**Tabel 2.59 Pencapaian RPJMD
Urusan Perhubungan Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Persentase kendaraan yang telah diuji berkala	78	113	80	88,80
	- Rata-rata pelanggaran lalu lintas per 1000 penduduk	64	76,6	63	60,72
	- Rasio izin trayek	100	105	100	57,14
2	- Persentase tingkat ketersediaan prasarana perhubungan	57	58	64	64
	- Jumlah terminal	2	2	2	2
3	- Persentase pemasangan rambu-rambu	87	95	89	29,54

Sumber: Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2012

Pada urusan perhubungan, dari 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015, sampai tahun 2012 ada 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yaitu rasio izin trayek yang terealisasi sebesar 57,14% dan persentase pemasangan rambu-rambu hanya terealisasi sebesar 33,19% dari target yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja rata-rata pelanggaran lalu lintas per 1000 penduduk terjadi penurunan sebesar 96,38% dari target yang ditetapkan. Terkait dengan penurunan ratio izin trayek hal ini disebabkan banyaknya angkutan tidak beroperasi lagi serta terjadinya peralihan angkuta kota kepada becak motor dan ojek. Sedangkan penurunan realisasi persentase pemasangan rambu-rambu disebabkan kurang tersedianya anggaran yang memadai baik melalui APBD Kota Solok maupun melalui DAK serta sumber dana lainnya.

8. Lingkungan Hidup

**Tabel 2.60 Pencapaian RPJMD
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Persentase ketersediaan fasilitas pengurangan sampah perkotaan	7	7	8	8
	- Persentase ketersediaan sistem penanganan sampah	60	55	65	60
2	- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	56	50	62	70,6
	- Persentase efektivitas kinerja IPAL UKM	36	30	52	30
3	- Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	45	45	50	75
	- Pencemaran status mutu air	45	70	50	77,78
4	- Persentase penanganan tebing sungai yang rawan pengikisan	55	9,73	60	60
5	- % RTH yang tersedia	22	22	25	25

Pada urusan lingkungan hidup, dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015, sampai tahun 2012 ada 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yaitu persentase ketersediaan sistem penanganan sampah yang terealisasi sebesar 92,3% dan persentase efektivitas kinerja IPAL UKM yang hanya terealisasi sebesar 57,69% dari target yang ditetapkan. Terkait dengan efektivitas kinerja IPAL UKM, hal ini disebabkan karena pembangunan IPAL UKM yang direncanakan dari sumber dana DAK pada tahun 2011 dan 2012 tidak terlaksana karena ada permasalahan sementara di lain pihak, UKM yang sudah memiliki IPAL, belum mengoperasikannya secara optimal.

Namun demikian, ada 3 (tiga) Indikator kinerja yang realisasinya sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL terealisasi sebesar 113,87%, persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup terealisasi sebesar 150% serta pencemaran status mutu air terealisasi sebesar 155,56%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

9. Pertanian

**Tabel 2.61 Pencapaian RPJMD
Urusan Pertanian Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial	55	50	60	

Indikator kinerja pada urusan pertanian yaitu persentase penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial belum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan karena terbatasnya anggaran untuk pembebasan tanah serta adanya permasalahan dalam pembebasan tanah. Sementara pada tahun 2012 terkait dengan keluarnya UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proses pengadaan tanah menunggu aturan pelaksanaan dari UU dimaksud.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan direncanakan setiap tahunnya dengan program penataan administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan). Untuk pelaksanaan KTP elektronik Kota Solok meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Kota Solok dalam menerapkan dan mensosialisasikan E-KTP yang melebihi kuota, dimana kuota telah ditetapkan Kota Solok sebesar 35.000 kuota, sementara Kota Solok telah melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 35.200 kuota. Adapun pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil dengan realisasi capaian kinerja program dengan indikator telah mencapai hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.62 Pencapaian RPJMD
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	80	74	85	85
	- Rasio bayi ber akte kelahiran	50	60	55	78
	- Rasio pasangan ber akte nikah	50	86	55	88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio penduduk ber-KTP Rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi ber-akte kelahiran, Rasio Rasio penduduk akte nikah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target , namun ke tiga indikator tersebut di atas masih perlu meningkatkan capaian target kinerja program hingga tahun 2015.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan setiap tahunnya dengan program kegiatannya penguatan kelembagaan PUG dan anak , peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Untuk itu perlu meningkatkan kedudukan dan peran serta gender dalam manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola dan menguatkan kelembagaan PUG dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.63 Pencapaian RPJMD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2012

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase organisasi perempuan yang mempunyai usaha produktif	20	7	25	11

Sumber: Badan KBPMP Kota Solok

Untuk capaian realisasi target Indikator kinerja program dalam RPJMD pada organisasi perempuan yang mempunyai usaha produktif pada tahun 2012 sebesar 11%, hal ini masih perlu ditingkatkan realisasi target kinerja sampai tahun 2015 sebesar 25%.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah melaksanakan program kegiatan setiap tahunnya sesuai yang direncanakan dan telah berhasil meraih berbagai penghargaan diantaranya: Juara I pesona KB lestari tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara I PKB pencaian peserta KB dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), juara II kelompok KB pria tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara II kader BKB tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara II penyuluh KB tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara Harapan I PIK remaja tahap tumbuh tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan banyak lagi penghargaan yang diperoleh pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Dari penghargaan yang telah dicapai pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan realisasi capaian target kinerja program RPJMD tahun 2012 telah mencapai 100%, dan dapat dilihat pada tabel realisasi capaian target kinerja program RPJMD di bawah ini:

**Tabel 2.64 Pencapaian RPJMD
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Persentase menurunnya angka kelahiran	3,64	3.54	3,58	3,53
	- Persentase menurunnya unmet need	13,01	9.79	12,51	13,24
	- Cakupan peserta KB aktif	70	76.73	70	72,39
	- Laju pertumbuhan penduduk	1,20	2.13	1,15	2,12

Sumber: Badan KBPMP Kota Solok

13. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial telah melaksanakan program sesuai yang direncanakan setiap tahunnya dan telah berhasil meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pekerja sosial, meningkatnya kapasitas lembaga-lembaga sosial, menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial yang dibina dan mandiri, bertambahnya Jumlah sarana sosial (panti asuhan, rumah singgah, panti jompo), dan menurunnya angka kemiskinan.

Tabel 2.65 Pencapaian RPJMD Urusan Sosial Tahun 2011-2012

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Persentase angka kemiskinan (KK Miskin)	50 klp	6.72	10,3	6,6
2	- Persentase ex penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina dan mandiri	5	22.15	10	32,52
3	- Jumlah sarana sosial (panti asuhan, rumah singgah, panti jompo)	2	8	2	7

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Untuk urusan sosial pada tahun 2012 realisasi capaian target kinerja program RPJMD telah mencapai target, namun ke tiga indikator tersebut diatas masih perlu meningkatkan capaian target kinerja program hingga tahun 2015.

14. Ketenagakerjaan

Berdasarkan RPJMD Kota Solok 2010-2015, sasaran yang ingin dicapai pada penyelenggaraan urusan ini adalah meningkatnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dalam pasar kerja. Berikut capaian kinerja program urusan ketenagakerjaan :

**Tabel 2.66 Pencapaian RPJMD
Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2011-2012**

No	Indikator kinerja	2011		2012	
		target	Realisasi	target	Realisasi
1	Jumlah pencari kerja yang tersalurkan di pasar kerja	40	50	45	46

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD selama tahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan RPJMD Kota Solok 2010-2015, sasaran yang ingin dicapai pada penyelenggaraan urusan ini adalah meningkatnya kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa. Berikut capaian kinerja program urusan Koperasi dan UKM:

**Tabel 2.67 Pencapaian RPJMD
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2011-2012**

No	Indikator kinerja	2011		2012	
		target	Realisasi	target	Realisasi
1	- Pertumbuhan omset UMKM	25	10	25	10
	- Pertumbuhan modal koperasi	20	13,98	22	25
	- Jumlah BPR/LKM	9	9	11	11
	- Pertumbuhan SHU koperasi	30	19,71	30	15
2	- Persentase koperasi aktif	74	74,6	74	75

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 indikator penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM, 2 indikator tidak mencapai dari target yang ditetapkan yaitu pertumbuhan omzet UMKM dan pertumbuhan SHU Koperasi. Hal ini disebabkan masih rendahnya daya saing dari produk UMKM yang dihasilkan dan perkembangan usaha koperasi yang belum baik serta masih kurangnya inovasi dari pengurus koperasi untuk mengembangkan usaha koperasi (diversifikasi usaha), dimana sampai saat ini sebagian besar koperasi masih bergerak dibidang usaha simpan pinjam.

16. Penanaman Modal

Berdasarkan RPJMD Kota Solok 2010-2015, sasaran yang ingin dicapai pada penyelenggaraan urusan ini adalah terwujudnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk pengembangan ekonomi daerah dan meningkatnya kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa. Berikut capaian kinerja program urusan Penanaman Modal:

**Tabel 2.68 Pencapaian RPJMD
Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2012**

No	Indikator kinerja	2011		2012	
		target	Realisasi	target	Realisasi
1.	- Rata-rata pertumbuhan penanaman modal	5	4,67	5	4,75
	- Ketepatan waktu prosedur penanaman modal	10	15	7	10
2	- Tingkat pemanfaatan TI	6	6	7	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penyelenggaraan urusan penanaman modal tidak ada yang mencapai target dari yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari pertumbuhan penanaman modal dari target pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 5% hanya tercapai sebesar 4,75%. Begitu juga dengan ketepatan waktu penanaman modal dari yang ditetapkan sebanyak 7 hari baru terealisasi 10 hari. Hal ini disebabkan masih rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Solok dan belum adanya SOP dari penanaman modal.

17. Kebudayaan

Tabel 2.69 Pencapaian RPJMD Urusan Kebudayaan 2011-2012

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Jumlah dokumen pelestarian nilai-nilai adat dan budaya	1	1	2	1
	- Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	27	3	14
2	- Jumlah benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi	10	10	10	10
	- Persentase panggung pidato adat yang aktif	100	100	100	100

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya sesuai dengan target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015. Pencapaian indikator kinerja program pada urusan kebudayaan pada tahun 2012 secara umum juga telah mencapai target, namun masih diperlukan peningkatan upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat budaya melalui penyusunan dokumentasi nilai-nilai adat budaya serta peningkatan upaya pelestarian benda-benda cagar budaya yang ada di Kota Solok.

18. Pemuda dan Olahraga

**Tabel 2.70 Pencapaian RPJMD
Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Jumlah organisasi kepemudaan yang punya kompetensi	19	19	21	15
2	- Persentase ketersediaan kebutuhan prasarana dan sarana olahraga	55	45	60	55
3	- Jumlah atlit berprestasi	59	110	59	36

Penyelenggaraan urusan kpmuda dan olahraga dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya sesuai dengan target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015. Pencapaian indikator kinerja program pada urusan pemuda dan olahraga pada tahun 2012 secara umum masih perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan pemuda dan organisasinya guna meningkatkan kompetensinya serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga guna meningkatkan prestasi atlit-atlit Kota Solok.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah melaksanakan program setiap tahunnya sesuai yang direncanakan dan telah berhasil melaksanakan program kegiatannya dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap penyakit masyarakat serta memberikan pendidikan dan pembinaan tentang politik kepada masyarakat agar organisasi masyarakat dan parpol dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Realisasi capaian target kinerja RPJMD tahun 2011 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.71 Pencapaian RPJMD
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Persentase pengurangan penyakit masyarakat	18	100	26	100
2	- Persentase partisipasi politik masyarakat	50	100	60	100
3	- Persentase gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	9	9	8	8
	- Persentase partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	82	100	84	100
	- Tingkat kesiapan penanggulangan bencana	55	75.23	60	75

Sumber: Badan Kesbangpollinmas Kota Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan untuk capaian target kinerja program RPJMD tahun 2012 telah mencapai sebesar 100%.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian terdapat 9 program prioritas yang akan dilaksanakan. Berikut capaian kinerja masing-masing program terhadap indikator sasaran RPJMD pada tahun 2012:

**Tabel 2.72 Pencapaian RPJMD Urusan Otonomi Daerah
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah
Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Persentase kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan	79	79	83	83
2	- Rasio PAD dengan pendapatan daerah	6,58	6,82	7	6,01
	- Persentase akurasi hasil inventarisasi aset Pemda	50	50	75	75
	- Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	75	75	75	75
	- Opini terhadap laporan keuangan Pemda	WDP	WDP	WDP	WDP
	- Persentase penerapan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah	50	50	70	70
	- Tingkat ketersediaan data pendapatan	50	50	75	75
3	- Persentase tindak lanjut temuan	75	82,28	78	80,41
	- Jumlah temuan pemeriksaan	250	272	225	304
	- Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah	0,2	0,22	0,2	0,32
4	- Rasio tenaga pengawas yang bersertifikasi auditor	60	54	70	44
5	- Persentase kompetensi aparatur di bidang hukum	86	88	87	89
	- Persentase penyempurnaan produk hukum	86	87	87	90
	- Persentase penegakan Perda	47	76,47	55	75
	- Persentase kinerja aparatur bidang hukum dalam memfasilitasi penyelesaian masalah hukum	86	88	87	88
	- Tingkat kesadaran hukum masyarakat	63	65	65	66
	- Tingkat partisipasi masyarakat dibidang hukum	63	65	65	68
	- Tingkat produk hukum yang partisipatif	86	87	87	91
	- Tingkat keserasian antara produk hukum dengan peraturan perundang-undangan Yang lebih tinggi	86	88	87	88
6	- Persentase penyelesaian pengajuan perizinan tepat waktu	55	83	65	85
	- Tingkat kepuasan masyarakat	75	78	76	80

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	- Persentase jenis perizinan yang memiliki SOP	70	92,60	80	90
7	- Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	80	80	80	85
8	- Persentase jabatan struktural sesuai kompetensi	72	87,04	74	78,13
	- Persentase jabatan fungsional sesuai kompetensi	82	90,51	84	95,35
	- Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat penjenjangan	18	15,46	9	16,84
9	- Rasio S1 per jumlah aparatur	53	48,46	56	54,18
	- Rasio S2 per jumlah aparatur	6	4,46	7	6,9
	- Persentase pelanggaran disiplin pegawai	40	28,57	30	2,37
	- Persentase pegawai sesuai formasi di masing-masing SKPD	40	28,26	55	92,6

21. Ketahanan Pangan

Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 sasaran yang ingin dicapai pada penyelenggaraan urusan ini adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Capaian kinerja program urusan Ketahanan pangan sebagai berikut :

**Tabel 2.73 Pencapaian RPJMD
Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2012**

No	Indikator kinerja program	Capaian kinerja program			
		2011		2012	
		target	Realisasi	target	Realisasi
1.	- Tingkat ketersediaan bahan pangan utama - Padi (Kg/perkapita)	293,85	429,48	305,61	286,36
	- Tingkat skor pola pangan harapan	79,16	76,05	83,12	77,46

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 2 indikator penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan belum tercapai karena, untuk tingkat ketersediaan bahan pangan utama (padi) disebabkan berkurangnya area untuk persawahan.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah melaksanakan program setiap tahunnya sesuai yang direncanakan dan telah berhasil melaksanakan program kegiatannya meningkatnya jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif dan tingkat partisipasi masyarakat. Semua LPMK yang ada di 13 Kelurahan sudah berperan aktif dalam berbagai aktifitas masyarakat.

Realisasi capaian target kinerja RPJMD tahun 2011 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.74 Pencapaian RPJMD
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Rasio swadaya masyarakat terhadap stimulan pemerintah	82	90	84	44,8
2	- Jumlah BMT	36	20	38	24
	- Jumlah Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS)	1	1	2	1
	- % pemberi zakat (Muzzaki)	22		29	
	- % penerima zakat (Mustahik)	34		38	
	- Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal dari BUMN/BUMD	75	65	85	69
3	- Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	15	16	15	16

Sumber: Badan KBPMP dan Bagian Kesra Kota Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan desa pada tahun 2012 untuk beberapa indikator belum dapat dilihat capaiannya target dalam RPJMD seperti : Untuk indikator Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Muzzaki, Mustahik dikarenakan masih belum diperolehnya data realisasi pada tahun 2012.

23. Statistik

Tabel 2.75 Pencapaian RPJMD Urusan Statistik Tahun 2011-2012

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2011		Tahun 2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Ketersediaan Data	66	65	72	98
2	Persentase Akurasi Data	55	57	60	63

Penyelenggaraan urusan statistik telah berjalan dengan baik dengan capaian realisasi RPJMD Kota Solok Tahun 2010 – 2015, yaitu :

1. Persentase ketersediaan data pada Tahun 2012 telah mencapai 98 % dari target pada 2012 sebesar 72 %
2. Persentase akurasi data pada Tahun 2012 telah mencapai 63 % dari target pada 2012 sebesar 60 %

Melalui pelaksanaan Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah sebagai prioritas daerah Kota Solok periode 2010 – 2015 dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan ketersediaan dan akurasi data/ informasi.

24. Kearsipan

Sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, pada Urusan Kearsipan terdapat 2 program prioritas yang akan dilaksanakan. Berikut capaian kinerja masing-masing program terhadap indikator sasaran RPJMD pada tahun 2012 :

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - Persentase pengelolaan arsip secara baku, dengan capaian 16%
 - Persentase pengelola arsip yang terampil, dengan capaian 87%
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 - Persentase akuntabilitas penyimpanan dokumen arsip daerah, dengan capaian 1,2%
 - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip, dengan capaian 35%

25. Komunikasi dan Informasi

Penyelenggaraan urusan kominfo telah berjalan baik sehingga setiap tahun dapat telah terlaksana dengan kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kerjasama informasi dengan media masa, pengadaan alat-alat studio dan komunikasi, peningkatan keterampilan dan profesionalisme, pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

Adapun pelaksanaan Urusan Kominfo telah dilaksanakan oleh Bagian Humas Setda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja program telah mencapai hasil persentase ketersediaan jaringan informasi berbasis IT oleh SKPD 82 %

Adapun pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informasi dengan realisasi capaian kinerja program dengan indikator telah mencapai hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.76 Pencapaian RPJMD
Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2011-2012**

No	Indikator Kinerja	2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase ketersediaan jaringan informasi berbasis IT oleh SKPD	77	77	82	82

26. Perpustakaan

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - Persentase jumlah kunjungan ke Perpustakaan umum, dengan capaian 5,12%
 - Persentase pemenuhan kebutuhan buku/ bacaan di perpustakaan, dengan capaian 0%

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 sasaran yang ingin dicapai pada urusan penyelenggaraan Pertanian ini adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Capaian Kinerja Program Urusan pertanian sebagai berikut :

Tabel 2.77 Pencapaian RPJMD Urusan Pertanian Tahun 2011-2012

No	Indikator kinerja	2011		2012	
		target	Realisasi	target	Realisasi
1	- Tingkat pendapatan petani				
	Padi: Rp. 19,950 juta/ha/Tahun	21,00	23,00	22,05	20,10
	Perkebunan: Rp.18,500juta/ha/Tahun	22,00	19,88.	23,10	22,50
	Ternak: Rp.20,750juta/tahun	21,00	21,79	22,00	2280
	Perikanan: Rp.19,200 juta/Tahun	23,50	20,81	24,68	22,23
2	- Tingkat cakupan bina kelompok tani	100	100	100	100
	- Tingkat kemampuan dan kemandirian kelembagaan tani	32	32	35	20
	- Tingkat pemenuhan kebutuhan pasar terhadap hasil produksi pertanian/Perkebunan	24	24	28	28
3	Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian				
	Padi = Ton/Ha GKG	6,08	7,2	6,26	6,8
	Jagung = Ton Tongkol/Ha	8,4	8,2	8,82	8,2
4	- Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi pertanian/ perkebunan	50	52	60	60
	- Penurunan angka prevalensi penyakit dan kematian ternak	10	5	8	2
	- Tingkat populasi ternak sapi	4.378	1.767	4.596	2012
	- Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi peternakan	55	57	60	75

Berdasarkan tabel diatas dari 13 indikator yang ingin dicapai pada urusan ini, 3 belum tercapai yaitu tingkat pendapatan petani hal ini disebabkan kerana berkurangnya ditahun 2011 adanya bantuan benih unggul untuk tahun 2012 tidak ada, sedangkan indikatorarea perata-rata telah mencapai target sedangkan untuk indikator Tingkat kemampuan dan kemandirian kelembagaan tani tidak tercapai disebabkan penilaian klas kelompok tani berbeda dengan tahun sebelumnya.

2. Kehutanan

Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Capaian Kinerja Program Urusan Kehutanan sebagai berikut :

Tabel 2.78 Pencapaian RPJMD Urusan Kehutanan Tahun 2011-2012

No	Indikator kinerja	Capaian kinerja program			
		2011		2012	
		target	Realisasi	target	Realisasi
1	- Pengendalian pelanggaran peredaran hasil hutan	36	36	52	66,6
	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi kebakaran hutan	35	35	45	75
2	- Rehabilitasi hutan & lahan kritis	45,88	43,12	53,31	59,14
	- Kerusakan kawasan hutan	38,5	1,03	35,13	1,35
	- Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan kota (batang)	5000	191.755	5000	90736

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari indikator tersebut telah tercapai yang mana dari indikator tersebut terlihat bahwa telah adanya kesadaran masyarakat dalam perlindungan hutan serta rehabilitasi hutan

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk urusan energi dan sumber daya mineral tidak adanya indikator yang dicapai karena dalam RPJMD Tahun 2010-2015 tidak ada program prioritas .sebab di Kota Solok tidak ada sumber daya energi dan hanya ada galian C.

4. Pariwisata

Berdasarkan RPJMD Kota Solok 2010-2015, sasaran yang ingin dicapai pada penyelenggaraan urusan ini adalah meningkatnya daya tarik obyek wisata. Berikut capaian kinerja program urusan Pariwisata:

Tabel 2.79 Pencapaian RPJMD Urusan Pariwisata Tahun 2011-2012

No	Indikator kinerja	Capaian kinerja program			
		2011		2012	
		target	Realisasi	target	Realisasi
1.	- Persentase Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata	15	15	20	20
2	- Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisata	8	11,26	10	11,17

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan urusan pariwisata tahun 2012 telah dapat mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan baik dalam persentase penyediaan prasarana dan pariwisata maupun dari pertumbuhan angka kunjungan wisata ke Kota Solok.

5. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 sasaran yang ingin dicapai pada urusan ini adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian Capaian Kinerja program urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Tabel 2.80 Pencapaian RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011-2012

No	Indikator kinerja	Capaian kinerja program			
		2011		2012	
		target	Realisasi	target	Realisasi
1	- Konsumsi ikan	32,4	21,67	36,8	34,29
	- Tingkat produksi hasil komoditas perikanan	62,33	68,08	65,3	81,81
	- Tingkat pemenuhan kebutuhan pasar terhadap hasil produksi perikanan	9,32	14,97	13,24	11,8

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 indikator diatas belum tercapai 2 indikator yaitu kosumsi ikan dan tingkat pemenuhan kebutuhan pasar terhadap hasil produksi perikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat petani dalam pengelolaan perikanan

6. Perdagangan

Berdasarkan RPJMD Kota Solok 2010-2015, sasaran yang ingin dicapai pada penyelenggaraan urusan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif dan terciptanya lingkungan tempat usaha yang aman dan nyaman. Berikut capaian kinerja program urusan Perdagangan:

Tabel 2.81 Pencapaian RPJMD Urusan Perdagangan Tahun 2011-2012

No	Program prioritas	Indikator kinerja program	2011		2012	
			target	Realisasi	target	Realisasi
1	Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	- Ketersediaan prasarana pasar	0	0	0	0
		- % kondisi fisik bangunan Ps. Raya	45	45	48	48
		- ketersediaan master Plan pasar	0	0	0	0
2	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	- Jumlah penyelesaian kasus perlindungan Konsumen	60	0	70	0
3	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	- Ketersediaan lokasi PKL	10	20	20	20
		- Cakupan bina kelompok pedagang	40	40	50	20

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Khusus untuk cakupan bina kelompok pedagang dari target yang ditetapkan sebanyak 50% kelompok pedagang yang ada, baru 20% yang bisa dilakukan pembinaan. Hal ini disebabkan oleh jumlah kelompok pedagang yang semakin berkurang dan banyaknya kelompok pedagang yang telah bubar.

7. Industri

Berdasarkan RPJMD Kota Solok 2010-2015, sasaran yang ingin dicapai pada penyelenggaraan urusan ini adalah meningkatnya kompetensi dan daya saing pelaku usaha industri kecil/rumah tangga. Berikut capaian kinerja program urusan Industri:

Tabel 2.82 Pencapaian RPJMD Urusan Perdagangan Tahun 2011-2012

No	Urusan dan program prioritas	Indikator kinerja program	Capaian kinerja program			
			2011		2012	
			target	Realisasi	target	Realisasi
1.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	- Persentase IKM yang produknya masuk ke pasar regional	12	17,95	14	25,31
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Pertumbuhan omzet IKM	5	5	5	5,42
		- Persentase produk IKM yang mempunyai SPP-IRT	39	60	43	63,52

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penyelenggaraan urusan industri pada tahun 2012 telah memperlihatkan kinerja yang baik untuk pencapaian target, dimana telah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna serta berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Solok dalam melaksanakan Pembangunan secara umum, yaitu :

Pertama, Terbatasnya anggaran pembangunan daerah. APBD Kota Solok pada tahun 2013 sebesar Rp 475.732.910.935,92 atau 34,16 % terhadap estimasi nilai PDRB Kota Solok Tahun 2012. Dalam konteks pembangunan daerah di Kota Solok, APBD menduduki posisi yang sangat strategis guna menstimulasi perekonomian di Kota Solok.

APBD Kota Solok diharapkan mampu menggerakkan peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat, menggairahkan perdagangan keluar dan kedalam daerah, serta mendorong investasi melalui peningkatan sarana dan prasarana publik.

APBD dengan jumlah yang besar demikian, apabila dilihat dari komposisinya masih didominasi dengan belanja pegawai yang mencapai 52,76%. Dalam tataran ideal belanja pegawai harus lebih kecil dibandingkan dengan belanja pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan akan terpenuhi dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan memiliki kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Untuk itu harus diimbangi oleh strategi yang tepat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah Kota Solok. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada APBD efisien, tepat sasaran, wajar, tidak *underfinancing* (kurang) atau *overfinancing* (berlebih).

APBD Kota Solok masih ditopang dari sebagian besar Dana Perimbangan. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah sinkronisasi pembangunan di setiap bidang sehingga dalam pelaksanaan program/ kegiatan terdapat keterpaduan, saling mendukung dan saling memperkuat dalam rangka mencapai sinergi melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemangku kepentingan terkait sampai pada level pemerintah pusat dan provinsi, dengan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Mengingat kondisi anggaran yang terbatas, maka harus dipastikan bahwa setiap Satuan Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan di setiap bidang dengan memiliki komitmen yang kuat pada pencapaian sasaran dan visi misi pembangunan daerah.

Kedua, Ketersediaan Infrastruktur yang Terbatas. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena perwujudan Solok sebagai kota Perdagangan dan Jasa dan Pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai. Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat ditingkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta diangkat harkat dan daya saing Indonesia dalam tatanan global. Dalam pembangunan infrastruktur ini, tantangan yang dihadapi di satu sisi terletak pada bagaimana infrastruktur membantu pengurangan kemiskinan ditengah tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pelayanan umum, sementara di sisi lain kemampuan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau terkendala oleh keterbatasan anggaran. Pembangunan infrastruktur sangat penting, yakni sebagai:

1. tulang punggung produksi dan pola distribusi barang dan penumpang;
2. perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. pemicu pembangunan suatu kawasan
4. pembuka keterisolasian suatu wilayah
5. prasyarat kesuksesan pembangunan di berbagai sektor

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih produktif lagi dalam melakukan kegiatannya. Pembangunan infrastruktur perlu diorientasikan kepada penanggulangan kemiskinan di daerah, yang dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerjasama melalui kemitraan secara adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Untuk itu, kapasitas masyarakat, pemerintah dan dunia usaha harus disejajarkan sehingga dalam memroses pembangunan infrastruktur fungsi dan peran masing-masing dapat saling melengkapi. Pemerintah, pada khususnya, akan terus berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, dengan program dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Ketiga, Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi. Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi dan meningkatkan kinerja dan citra pelayanan publik. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa dalam meningkatkan daya saing daerah.

Oleh karena itu, secara terinci dari inventarisasi spesifik permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Solok, sesuai dengan 13 prioritas pembangunan, sebagai berikut :

I. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Prioritas 1:

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah .

Prioritas peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah diarahkan untuk dapat menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa dengan menjalankan syariat agama sebagaimana mestinya serta peningkatan peran kelembagaan adat dan budaya dalam menggerakkan pembangunan, peningkatan nilai-nilai adat, seni dan budaya lokal serta pengembangan kesenian anak nagari. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 1, yaitu :

1. Belum jelasnya lembaga yang berkompeten dalam melakukan sertifikasi guru TPA/MDA;
2. Masih minimnya sarana dan prasarana TPA/MDA
3. Kurang menariknya materi yang disampaikan pada pelaksanaan MABIT
4. Masih adanya masjid/ mushalla yang sepi masalah
5. Masih rendahnya peran tokoh adat/ budaya atau kelembagaan dalam pengembangan nilai-nilai adat dan budaya
6. Masih kurang pengutan kelembagaan adat dan budaya
7. Masih belum optimalnya penggalian nilai – nilai adat dan budaya
8. Kurang terpeliharanya dan tersosialisasinya situs budaya dan cagar budaya yang dilindungi
9. Terbatasnya generasi muda yang terampil dengan pidato adat

Prioritas 2:**Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan.**

Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan ditujukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang selalu ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 2 yaitu :

1. Masih kurangnya pendidikan dan keterampilan tenaga pendidik berbasis kompetensi dan metode pembelajaran.
2. Masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum sesuai estándar
3. Belum konsistennya pelaksanaan rayonisasi Penerimaan Siswa Baru (PSB)
4. Masih rendahnya minat baca masyarakat

Prioritas 3:**Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.**

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 3 yaitu :

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat
2. Masih rendahnya pemahaman medis dan masyarakat terhadap penanganan kesehatan
3. Masih tingginya angka kelahiran penduduk (3,53 %)

Prioritas 4:**Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan.**

Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang menjadi perhatian khusus mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 4 yaitu :

1. Masih kurangnya komitmen penggunaan basis data kemiskinan (PPLS)
2. Masih lemahnya kualitas SDM Keluarga Miskin dalam pemberdayaan ekonomi
3. Kecilnya Indeks perbaikan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni

Prioritas 6:**Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi.**

Prioritas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 6 yaitu :

1. Belum tersedianya regulasi daerah dalam mengatur kedisiplinan pegawai
2. Masih rendahnya penegakan peraturan kepegawaian melalui reward and punishment
3. Belum terisinya jabatan fungsional di SKPD
4. Masih terbatasnya SDM pengelola arsip yang terampil di SKPD
5. Masih terbatasnya prasarana penyimpanan arsip
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap usulan perencanaan yang disampaikan ke tingkat kota
7. Masih terbatasnya ketersediaan data yang akurat
8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Prioritas 9:**Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.**

Prioritas Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemuda dan olah raga yang representatif yang dapat menunjang peningkatan prestasi olah raga bagi siswa dan masyarakat serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 9 yaitu :

1. Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga
2. Masih rendahnya tingkat prestasi olah raga yang diraih

Prioritas 11:**Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.**

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu indikator pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 11 yaitu :

1. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah
2. Pengelolaan asset daerah belum optimal (inventarisasi dan penatausahaan)
3. Kapasitas jaringan untuk mendukung kelancaran SIPKD masih rendah
4. Modul perencanaan dan pertanggungjawaban dalam SIPKD belum terlaksana
5. Kemampuan SDM operator SIPKD di bidang perencanaan masih terbatas
6. Belum maksimalnya ketersediaan data potensi pendapatan

Prioritas 13:**Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat.**

Prioritas Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat diarahkan kepada peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tersedianya piranti hukum yang menjamin hak publik atas informasi setiap kebijakan pemerintah daerah serta meningkatnya kualitas, kesejahteraan dan ketersediaan sarana aparat penegak peraturan daerah. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 13 yaitu :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum
2. Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan dan penegakan produk hukum
3. Masih banyaknya terjadi pelanggaran Perda

II. BIDANG EKONOMI**Prioritas 5:****Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran.**

Prioritas peningkatan daya saing UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah karena peningkatan daya saing UMKM dapat mengatasi masalah ekonomi dan sosial sekaligus. Selain pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing UMKM juga berdampak terhadap pemerataan pendapatan dan hal ini akan berimplikasi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 5 yaitu :

1. Belum optimalnya pendampingan yang dilakukan Pemerintah terhadap pengelolaan UMKK
2. Kualitas produk yang di hasilkan kalah bersaing

3. Masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk menyediakan produk partai besar
4. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan sebagian UKM
5. Belum optimalnya pemanfaatan TI oleh UKM dan SKPD
6. Belum optimalnya jaringan pelaku ekonomi
7. Perdagangan masih terpusat di kawasan pasar raya dan sebagian besar masih bersifat retail
8. Belum tertatanya bangunan di kawasan pasar raya
9. Belum tertatanya penempatan pedagang sesuai dengan peruntukannya
10. Masih banyak pencari kerja yang belum tersalurkan di pasar raya
11. Masih rendahnya kemampuan dan kemandirian kelembagaan tani
12. Areal pertanian cenderung semakin berkurang
13. Rumah potong hewan yang baru masih belum bisa difungsikan karena keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.

Prioritas 12:

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata.

Prioritas peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang representatif. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 12 yaitu :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang objek wisata, khususnya di kawasan wisata Pulau Belibis
2. Belum berkembangnya industri dan jasa kepariwisataan

III. BIDANG PRASARANA DAN SARANA WILAYAH

Prioritas 7:

Peningkatan pelayanan infrastruktur kota.

Pembangunan infrastruktur kota akan memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 7 yaitu peningkatan pelayanan infrastruktur jalan dengan pelebaran jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang sampai By Pass, lajutan pembangunan Jalan Lingkar Utara, pembenahan dan pembangunan jalur pejalan kaki/ pedestrian, serta optimalisasi fungsi Terminal Barih Solok dan penyediaan lahan terminal truk. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 7 yaitu :

1. Masih terdapatnya 94,49 km jalan dalam kondisi tidak baik
2. Beberapa ruas jalan tidak bisa menampung volume kendaraan (pelebaran jalan Dt.Parpatiah Nan Sabatang sampai by pass)
3. Belum seluasnya pembangunan Jalan Lingkar Utara
4. Belum memadai jalur pejalan kaki/ pedestrian
5. Terbatasnya sumber air untuk memenuhi kebutuhan irigasi
6. Terbatasnya lahan untuk pembangunan infrastruktur
7. Dibeberapa lokasi terbatas ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman yang memadai
8. Masih terbatasnya permukiman yang tertata
9. Masih kurangnya tenaga BPK dan Relawan yang terampil
10. Masih kurangnya ketersediaan sarana pencegahan kebakaran

11. Belum seluruhnya angkutan umum memiliki izin trayek
12. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana perhubungan
13. Belum tersedianya terminal truk
14. Belum optimalnya fungsi Terminal Regional Bareh Solok
15. Masih terbatasnya rambu-rambu lalu lintas

Prioritas 8:

Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih.

Prioritas Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih sangat penting bagi sebuah kota untuk memenuhi kebutuhan standar bagi masyarakat perkotaan. Bila hal ini kurang diperhatikan, akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 8 yaitu :

1. Masih banyak terdapat tangki septik masyarakat yang tidak sesuai dengan standar
2. Belum tersedianya sistem air limbah skala komunitas kota
3. Masih tercampurnya saluran air limbah dengan drainase kota
4. Sistem drainase kota belum memadai
5. Belum memasyarakatnya pengelolaan sampah pola 3 R
6. Terbatasnya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
7. Belum jelasnya pengelola TPA Regional
8. Sistem pengolahan sampah masih *Control Landfill*
9. Terbatasnya ketersediaan air baku
10. Belum meratanya kuantitas distribusi air bersih ke rumah penduduk
11. Masih rendahnya kualitas air bersih disebagian permukiman

Prioritas 10:

Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Prioritas Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan pembangunan infrastruktur di pusat kota dan pinggiran, sehingga perkembangan fisik kota dapat lebih terarah dan terkendali sesuai dengan kondisi disetiap bagian wilayah kota. Oleh karena itu, masalah pada fokus prioritas 10 yaitu :

1. Masih banyaknya terdapat daerah yang rawan pengikisan tebing sungai
2. Masih terbatasnya RTH sesuai perundang-undangan
3. Masih rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan
4. Belum memadainya sistem pengolahan air limbah industri
5. Masih terbatasnya regulasi di bidang penataan ruang

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan pendidikan masih ditemui beberapa kendala/masalah yang masih perlu untuk ditingkatkan keberhasilannya, diantaranya:

- Masih rendahnya jumlah sekolah yang melaksanakan RSBI di tingkat SD, SMP dan SMA yang dikarenakan terkendalanya dalam memenuhi standarisasi yang diatur

dalam pelaksanaan RSBI. Namun hal ini memerlukan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah daerah terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan pasal 50 ayat 3 Undang-undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang membubarkan penyelenggaraan program RSBI

- Masih belum maksimalnya hasil dari pelaksanaan pelatihan professional bagi tenaga pendidik terutama kepala sekolah.
- Masih perlunya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru terutama bagi guru pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun
- Masih banyaknya sarana dan prasarana sekolah yang belum sesuai dengan standar pelayanan

2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan kendala/hal yang masih perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan kesehatan antara lain adalah:

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat
- Masih kurangnya peninjauan lapangan dalam rangka menemukan kasus-kasus masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat
- Belum terealisasinya pusat pelayanan spesifik traumatic center yang direncanakan berada di RSUD Kota Solok karena memerlukan koordinasi yang kuat dengan pemerintah propinsi

3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih rendahnya jalan dalam kondisi baik (52,86%)
- Terkendalanya proses pembebasan lahan berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan jalan
- Terbatasnya data yang valid untuk kondisi dan status jalan
- Belum memadainya kondisi trotoar yang ada
- Pemeliharaan drainase belum dilakukan secara baik
- Belum dilakukan pengamanan pada sebahagian tebing sungai dalam rangka mengantisipasi banjir
- Terjadinya pengikisan tebing baik di daerah permukiman maupun di lahan yang produktif akibat dari kondisi sungai yang berkelok-kelok

4. Perumahan

Penyelenggaraan urusan perumahan dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan perumahan masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Kurangnya sumber air baku di Kota Solok
- Belum seluruh warga di kelurahan mendapatkan pelayanan air bersih (12 jam)
- Sebahagian fisik air bersih menyerupai air sungai batang lembang
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sanitasi
- Ketidakmampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi karena keterbatasan pendanaan (miskin)

- Sebahagian drainase di lingkungan perumahan tidak berfungsi secara optimal
- Sebahagian bangunan rumah masyarakat belum didukung dengan IMB.
- Belum dilengkapinya kompleks perumahan dengan racun api/hydrant kebakaran
- Sulitnya masyarakat menyediakan lahan untuk TPS

5. Penataan Ruang

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada urusan penataan ruang adalah:

- Masih terbatasnya regulasi di bidang penataan ruang
- Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan dalam UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Belum adanya tindakan tegas terhadap bangunan yang melanggar roylen jalan atau tidak sesuai dengan ketentuan izin mendirikan bangunan.

6. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan adalah :

- Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat
- Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Masih lemahnya koordinasi pembangunan baik intern SKPD, antar SKPD maupun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
- Masih lemahnya komitmen para pihak dalam menjalankan seluruh ketentuan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan

7. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan perhubungan masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih belum sesuai kelayakan sebahagian kendaraan dengan ketentuan yang ada
- Belum optimalnya pengawasan lalu lintas angkutan umum
- Masih beroperasinya kendaraan yang tidak merupakan sarana angkutan masal seperti ojek namun masyarakat lebih cenderung menggunakan kendaraan alternatif (ojek dan becak motor) sebagai sarana transportasi dalam kota
- Belum optimalnya pemanfaatan terminal Bareh Solok karena penumpang cenderung naik dan turun di luar terminal
- Belum optimalnya sarana angkutan ke dan dari terminal Bareh Solok
- Kurangnya kepatuhan para pengguna jasa transportasi dan jalan terhadap aturan
- Terbatasnya aparat yang memiliki kualitas untuk menguji kelayakan kendaraan
- Relatif kurangnya mutu pelayanan bagi pengguna jasa transportasi dan jalan

8. Lingkungan Hidup

Dari gambaran aspek pelayanan umum pada urusan lingkungan hidup, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum memasyarakatnya pengelolaan sampah pola 3R (reduce, reuse, recycle)
- Terbatasnya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Belum jelasnya kelembagaan untuk pengelolaan TPA regional

- Belum memadainya sistem pengolahan limbah industri sehingga limbah industri rumah tangga atau aktivitas kegiatan usaha langsung dibuang ke sungai tanpa proses pengolahan.
- Masih rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan dan lemahnya penegakan aturan terhadap aktivitas yang mencemari lingkungan hidup
- Masih terbatasnya RTH sesuai perundang-undangan

9. Pertanian

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi terkait urusan pertanian adalah:

- Sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana kota
- Masih lemahnya administrasi pertanian terkait dengan bukti kepemilikan tanah yang merupakan aset pemerintah daerah

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih adanya masyarakat Kota Solok yang belum mempunyai akte nikah
- Masih perlunya pendampingan bagi masyarakat dalam pelaksanaan sidang istbat
- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat atas pelaporan pengurusan penerbitan KTP, KK, dan akta lainnya
- Masih kurang tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya identitas diri

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi sosial dan politik.
- Masih adanya kekerasan terhadap anak
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang KDRT dan peningkatan Pengembangan pelayanan terpadu dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih rendahnya partisipasi kaum pria untuk ikut dalam program keluarga berencana
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja
- Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam membudayakan keluarga bahagia dan sejahtera

13. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan sosial masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih kurangnya komitmen penggunaan basis data kemiskinan (data PPLS'11)
- Basis data yang tidak akurat
- Masih relatif tingginya angka kemiskinan dan berdampak terhadap timbulnya masalah kesejahteraan sosial.
- Timbulnya masalah sosial baru (kontemporer) seperti anak yang dieksploitasi, penyalahgunaan narkoba
- Belum memadainya prasarana dan sarana pendukung pelayanan sosial
- Masih lemahnya kualitas SDM keluarga miskin dalam pemberdayaan ekonomi
- Kecilnya indeks perbaikan / rehabilitasi rumah tidak layak huni

14. Ketenagakerjaan

Berdasarkan keadaan eksisting ketenagakerjaan di Kota Solok pada tahun 2012, penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Relatif belum tersedianya tenaga kerja terampil yang siap pakai
- Belum sesuai formasi yang tersedia di lapangan kerja dengan kualifikasi pendidikan pencari kerja yang ada.
- Masih tingginya angka pencari kerja yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Belum optimalnya pendampingan yang dilakukan terhadap pengelolaan UKMK
- Masih terbatasnya kemampuan UKMK untuk menyediakan produk dalam partai besar
- Masih rendahnya jiwa kewirausahaan sebahagian UKM
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh UKMK dan SKPD
- Masih rendahnya daya saing produk-produk UKM karena nilai tambah produk yang rendah
- Terbatasnya akses pasar dan permodalan

16. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan penanaman modal masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Belum adanya aturan yang menjamin investor untuk berinvestasi
- Belum optimalnya pemanfaatan TI
- Terbatasnya lahan yang dapat ditawarkan kepada investor yang siap pakai.

17. Kebudayaan

Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan untuk mencapai indikator kinerja urusan kebudayaan, kendala/masalah yang ditemui antara lain adalah:

- Sulitnya melaksanakan dokumentasi nilai-nilai adat dan budaya yang disebabkan karena sulitnya mencari tokoh masyarakat yang bisa menjadi sumber referensi dalam menyusun dokumen guna melestarikan adat budaya tersebut
- Masih rendahnya peran kelembagaan dan tokoh adat/budaya dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya
- Masih kurangnya pemahaman dan peranan pemuda dalam pelestarian adat budaya
- Belum maksimalnya upaya pemeliharaan dan pensosialisasian situs budaya dan cagar budaya yang dilindungi

18. Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di bidang olahraga
- Masih rendahnya produktifitas, kreatifitas dan prestasi SDM yang terkait di bidang olahraga
- Masih rendahnya peranan dan kreativitas generasi muda dalam menggalakkan kegiatan kepemudaan
- Belum adanya kalender event-event/kegiatan kepemudaan.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat
- Kecenderungan peningkatan terjadinya masalah-masalah sosial dan penyakit masyarakat
- Belum seluruh kelurahan melaksanakan siskamling dan memiliki poskamling dalam pengendalian keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan
- Belum optimalnya tingkat kesiagaan petugas dan masyarakat dalam menanggulangi bencana

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam rangka pencapaian indikator penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

- Belum tersedianya regulasi daerah dalam mengatur kedisiplinan pegawai
- Masih rendahnya penegakan peraturan kepegawaian melalui reward and punishment
- Belum terisinya jabatan fungsional di SKPD

- Rasio PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah
- Pengelolaan asset daerah belum optimal (inventarisasi dan penatausahaan)
- Kapasitas jaringan untuk mendukung kelancaran SIPKD masih rendah
- Belum maksimalnya ketersediaan data potensi pendapatan
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum
- Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan dan penegakan produk hukum
- Masih banyaknya terjadi pelanggaran Perda

21. Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan ketahanan pangan masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Terbatasnya kapasitas produksi bahan pangan utama
- Masih kurangnya konsumsi pangan yang memenuhi kecukupan gizi
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat
- Keterbatasan kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan
- Masih terbatasnya sosialisasi tentang panganekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat
- Belum tersosialisasinya program menu 3B (Bergizi, Berimbang, Beragam)

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih rendahnya kapasitas lembaga masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan.
- Masih kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan Goro Badunsanak, dimana masyarakat cenderung melaksanakan dengan pihak ketiga.

23. Statistik

Dalam penyelenggaraan urusan statistik, masih ditemui permasalahan/kendala diantaranya :

- Keakurasian data/informasi statistik yang masih rendah karena belum konsistennya data/ informasi dari SKPD serta belum optimalnya pengelolaan data/ informasi hasil pelaksanaan program/ kegiatan, dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah.
- Keterlambatan ketersediaan data/ informasi statistik sehingga masih banyak dipergunakan data prediksi/ proxy dalam penyajian data/ informasi statistik untuk memberikan gambaran aktivitas dan dinamika pembangunan daerah maupun dalam penyusunan perencanaan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

24. Kearsipan

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan kearsipan masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya :

- Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip
- Kurangnya pegawai yang memiliki latar belakang kearsipan di SKPD
- Kurangnya pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kearsipan di SKPD
- Kurangnya kesadaran unit kerja dalam menyerahkan arsip secara berkala,
- Terbatasnya aparatur yang mengikuti diklat kearsipan

25. Komunikasi dan Informasi

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informasi masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Belum seluruh SKPD menggunakan Sistem Informasi dalam pengelolaan data dan informasi
- Terbatasnya SDM pengelola sistem data dan informasi
- Masih belum lancarnya informasi dari web site kota karena belum dikelola dengan baik

26. Perpustakaan

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan perpustakaan masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya :

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
- Masih rendahnya minat baca masyarakat.
- Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan keliling

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan pertanian masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih rendahnya kemampuan dan kemandirian kelembagaan tani
- Semakin berkurangnya areal pertanian
- Masih terbatasnya sarana dan prasara pendukung rumah potong hewan
- Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian,
- Masih rendahnya diversifikasi nilai tambah produk pertanian,
- Masih lemahnya jaringan pemasaran produk pertanian

2. Kehutanan

Penyelenggaraan urusan kehutanan dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan kehutanan masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi hutan yang disebabkan oleh desakan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar hutan,
- Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola kehutanan

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan energi dan sumber daya mineral masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih langkanya bahan bakar minyak di pasaran
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akibat kerusakan bekas bahan galian golongan C
- Kurangnya pengendalian terhadap penambang liar
- Kurangnya kesadaran masyarakat yang berusaha di bidang pertambangan khususnya pertambangan bahan galian golongan C dalam memelihara kelestarian lingkungan.

4. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan pariwisata masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang objek wisata, khususnya dikawasan wisata Pulau Belibis
- Belum berkembangnya industri dan jasa kepariwisataan

5. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan petani ikan,
- Masih lemahnya jaringan pemasaran perikanan.
- Belum optimalnya pemanfaatan BBI

6. Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan perdagangan masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Perdagangan yang masih terkonsentrasi di Pasar Raya Solok dan sebagian masih bersifat retail
- Belum tertatanya dengan baik bangunan dikawasan Pasar Raya Solok
- Belum tertatanya pedagang sesuai dengan peruntukannya
- Belum optimalnya jaringan pelaku ekonomi
- Bertambahnya jumlah usaha sektor informal (PKL) yang belum tertata dengan baik
- Belum optimalnya jaringan pelaku ekonomi

7. Industri

Penyelenggaraan urusan industri dalam rangka pencapaian indikator kinerja urusan industri masih ditemui beberapa kendala/masalah diantaranya:

- Kualitas produk yang dihasilkan kurang bersaing di pasaran
- Masih rendahnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah
- Belum optimalnya pendampingan terhadap pelaku IKM

